



**RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2013-2025
(PERUBAHAN 2020)**



**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN WAJO**



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH

TAHUN 2013-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 27);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Danau Tempe (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 70);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 83);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAJO

DAN

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2013-2025.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah.

4. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
5. Bupati adalah Bupati Wajo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten Wajo untuk periode waktu 2013-2025.
8. Rencana Induk Pengembangan dan/atau pembangunan obyek wisata yang selanjutnya disebut RIPOW, adalah kebijaksanaan pengembangan obyek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Ae

14. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
17. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
18. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
19. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
20. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
21. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.

22. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata;
23. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyusunan RIPPARKAB bermaksud:

- a. menyatukan pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di Daerah terhadap pentingnya pariwisata dalam konteks perencanaan pembangunan Daerah;
- b. membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah; dan
- c. menyusun perencanaan pengembangan kepariwisataan yang mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan RIPPARKAB bertujuan:

- a. tersusunnya rencana strategi dan program kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang ada baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pembangunan sektor kepariwisataan secara komprehensif; dan
- c. memberikan panduan pada pemangku kepentingan dan pelaku kepariwisataan dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan secara profesional.

Pasal 4

RIPPARKAB disusun dengan prinsip:

- a. prinsip keseimbangan;
- b. prinsip konservasi;
- c. prinsip partisipasi masyarakat; dan
- d. prinsip keterpaduan.

- b. semua perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak lain terkait pembangunan kepariwisataan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO, *TE*

AMIRUDDIN A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR

TELAH DITELITI :
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AN
AND ELVIRA FAJARWATI P, S.H.
NIP 19840118 200604 2 010

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Wajo Tahun 2013 -2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo merupakan salah satu pedoman pembangunan sektor pariwisata dalam lingkup makro yang berisikan arahan pengembangan industri, destinasi, pemasaran, aksesibilitas, tata ruang, kelembagaan, investasi dan sumber daya manusia serta strategi pembangunan sektor pariwisata yang terarah dan terpadu dengan potensi yang ada di Kabupaten Wajo.

Sasaran Penyusunan Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo adalah (1) tersusunnya konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Wajo yang dilandasi pendekatan perencanaan pariwisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya (2) teridentifikasinya prioritas pengembangan daya Tarik wisata yang dapat diunggulkan dan atau diandalkan di Kabupaten Wajo dan (3) sebagai bahan data informasi bagi investor serta para pelaku pariwisata lainnya termasuk masyarakat luas tentang potensi kepariwisataan Kabupaten Wajo.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 (Perubahan Tahun 2020), semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo.

Sengkang, Desember 2010



BUPATI WAJO,

DR. H. AMRAN MAHMUD, S.sos, M.Si.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah melimpahkan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wajo yang telah melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Wajo yang maju dan sejahtera.

Kabupaten Wajo memiliki berbagai potensi yang beragam, baik berupa wisata alam,, wisata budaya, maupun wisata buatan. Dalam meningkatkan kontribusi pada sektor pariwisata perlu merujuk pada berbagai arahan, rencana, atau kebijakan yang terkait dengan pembangunan kepariwisataan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kabupaten Wajo perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan, strategi, ataupun program penyelenggaraan. Dengan adanya dokumen ini, seluruh kegiatan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo dapat terencana dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan nilai tambah yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Wajo.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor wisata di Kabupaten Wajo.

Sengkang,

2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran	3
1.3 Keluaran	5
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Metodologi	7
1.6 Jangka Waktu Pelaksanaan	8
1.7 Sistematika Pelaporan	8
BAB 2 KEPARIWISATAAN KABUPATEN WAJO DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	12
2.1 Kepariwisata Kabupaten Wajo dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Nasional	12
2.2 Kepariwisata Kabupaten Wajo dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	18
2.3 Kepariwisata Kabupaten Wajo dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah	20
BAB 3 KONDISI WILAYAH KABUPATEN WAJO DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	23
3.1 Kondisi Fisik	23
3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata	31
3.3 Kekayaan Ekologi Sebagai Potensi Pariwisata	35
3.4 Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata	39
3.5 Perekonomian	41
BAB 4 KABUPATEN WAJO SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA	46
4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata	46
4.2 Fasilitas Pariwisata	66
4.3 Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata	66
4.4 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata	67
4.5 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata	67
4.6 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata	69
BAB 5 INDUSTRI PARIWISATA	74
5.1 Usaha Pariwisata	74
5.2 Usaha Kecil Dan Menengah Pendukung Pariwisata Kabupaten Wajo	77

BAB 6	PASAR WISATA DAN UPAYA PEMASARAN	88
6.1	Jumlah Dan Perkembangan Pasar Wisata	88
6.2	Karakteristik Pasar Wisatawan	90
6.3	Upaya Pemasaran Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo	95
BAB 7	KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	98
7.1	Sumber Daya Manusia Pariwisata	98
7.2	Asosiasi Pariwisata	100
7.3	Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata	102
7.4	Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata	104
BAB 8	PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN WAJO	110
8.1	Tantangan Dan Isu Strategi Pembangunan Kepariwisata	110
8.2	Prinsip Pembangunan Kepariwisata	112
8.3	Konsep Pembangunan Kepariwisata	113
8.4	Visi	115
8.5	Misi	116
8.6	Tujuan	117
BAB 9	KEBIJAKAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	118
9.1	Kebijakan Pembangunan Kepariwisata	118
9.2	Strategi Pembangunan Kepariwisata	121
BAB 10	RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA...	126
10.1	Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata	127
10.2	Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategi Pariwisata	135
BAB 11	PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN	153

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Industri pariwisata di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat. Setiap tahun kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan ekonomi nasional semakin meningkat dimana pertumbuhan sektor pariwisata mencapai 12% dan kontribusinya mencapai 7% terhadap pembangunan di Indonesia. Ini sangat besar bagi struktur ekonomi nasional.

Pembangunan pariwisata perlu dipersiapkan secara terstruktur, terpadu dan berkesinambungan agar tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Penerapan otonomi daerah yang memberi kewenangan bagi daerah untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki termasuk dalam pariwisata, menjadi dasar pembangunan pariwisata di daerah agar manfaat sebesar-besarnya dapat dirasakan dan digunakan untuk pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) mendorong daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengembangan pariwisata salah satunya dengan menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB), dimana didalamnya mencakup pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/sumber daya manusia.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) merupakan salah satu pedoman dalam pengembangan pariwisata dalam lingkup makro. Didalamnya berisi arahan-arahan pengembangan industri, destinasi, pemasaran, aksesibilitas, tata ruang, kelembagaan dan SDM serta investasi.

Aparatur Pemerintah yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pariwisata seharusnya memahami proses penyusunan dan substansi dokumen RIPPARKAB ini. Mereka juga harus dapat memberikan masukan dan memantau agar substansi kedua dokumen ini sesuai dengan standard dan kebutuhan dari daerah. Begitu pentingnya peranan RIPPARKAB menjadikan Kabupaten Wajo berinisiatif untuk menyusun revisi “Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPPARKAB) Kabupaten Wajo 2013-2025.

Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo 2013-2025 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - d. Terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
 - e. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisata;
 - f. Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - g. Terbitnya Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kepariwisata;
 - h. Terbitnya Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Revisi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang berisikan arahan dan strategi pembangunan sektor pariwisata

yang lebih terarah dan terpadu dengan pemanfaatan potensi yang ada di Kabupaten Wajo.

Selain itu, penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Wajo juga dimaksudkan untuk:

1. Menyatukan pandangan diantara sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Wajo terhadap pentingnya pariwisata dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.
2. Membudayakan dan memudahkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo.
3. Menyusun perencanaan pengembangan kepariwisataan yang mampu meningkatkan kualitas kepariwisataan Kabupaten Wajo.

Penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 ini bertujuan antara lain:

1. Tersusunya rencana strategi dan program kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pembangunan sektor kepariwisataan secara komprehensif.
3. Memberikan panduan pada pemangku kepentingan dan pelaku kepariwisataan dalam mengembangkan kegiatan kepariwisataan secara profesional.

Sasaran yang ingin dicapai dari penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 adalah:

1. Tersusunnya konsep pengembangan kepariwisataan Kabupaten Wajo yang dilandasi pendekatan perencanaan

pariwisata dan isu-isu strategis yang terkait dengan sektor-sektor pembangunan lainnya.

2. Teridentifikasinya prioritas pengembangan Daya Tarik Wisata yang dapat diunggulkan dan atau diandalkan di Kabupaten Wajo.
3. Sebagai bahan data dan informasi bagi investor serta para pelaku pariwisata lainnya termasuk masyarakat luas tentang potensi kepariwisataan Kabupaten Wajo.

1.3. Keluaran

Pemerintah Kabupaten Wajo memiliki dokumen dasar dalam pembuatan kebijakan dibidang kepariwisataan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 terdiri atas tiga bahasan yaitu lingkup wilayah perencanaan, lingkup materi kajian dan lingkup kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut:

1.4.1. Lingkup Wilayah

Secara makro, Lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 adalah seluruh wilayah Kabupaten Wajo yang terbagi dalam 14 Kecamatan. Secara mikro, ruang lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan RIPPARKAB Kabupaten Wajo ini adalah menyangkut seluruh daya tarik wisata yang terdapat di wilayah Kabupaten Wajo.

1.4.2. Lingkup Materi

Dalam Penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 akan memuat mengenai beberapa rumusan alternatif rencana kepariwisataan

di Kabupaten Wajo berdasarkan data dan hasil analisis.

Lingkup materi dalam Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 antara lain:

1. Sinkronisasi kebijakan kepariwisataan Nasional/Provinsi/Kabupaten;
2. Kondisi wilayah Kabupaten dalam mendukung pembangunan kepariwisataan;
3. Pembangunan destinasi pariwisata;
4. Pembangunan industri pariwisata;
5. Pembangunan pemasaran pariwisata;
6. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
7. Prinsip dan konsep pembangunan kepariwisataan;
8. Kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan;
9. Rencana pengembangan perwilayahan pariwisata; dan
10. Program dan indikasi kegiatan pembangunan kepariwisataan.

1.4.3. Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup Kegiatan Penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 adalah:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan melalui faktor internal dan eksternal terhadap lokasi-lokasi daya tarik wisata di Kabupaten Wajo.
2. Melakukan kajian tata ruang pengembangan wilayah pariwisata yang didasarkan pada identifikasi potensi dan masalah.

3. Melakukan kajian terhadap pembangunan destinasi wisata, pemasaran, industri kepariwisataan dan kelembagaan.
4. Memberikan usulan rekomendasi atau usulan program pembangunan kepariwisataan lebih lanjut dan dapat menjadi pedoman/acuan dalam pengembangan pariwisata daerah.

1.5. Metodologi

1.5.1. Kerangka Pendekatan

Pelaksanaan pekerjaan ini menggunakan tiga metode pendekatan:

1. Metode desk study yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui kajian dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder, baik berupa laporan, referensi maupun peta-peta.
2. Metode pendekatan partisipatif yaitu salah satu metode yang digunakan dalam upaya menggali informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Untuk mengoptimalkan data dan informasi primer pihak dilakukan diskusi group terfokus (FGD).
3. Metode pendekatan survey (kunjungan dan pengamatan lapangan) yang dimaksudkan dalam pekerjaan adalah pengumpulan data/informasi yang tidak bisa diakomodir melalui pendekatan desk dan partisipatif.
4. Tahap penyusunan fakta dan Analisa

1.5.2. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam penyusunan Revisi RIPPARKAB Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025, Pemerintah Kabupaten berpedoman pada RIPPARNAS, RIPPAPROV, RPJPD, dan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta didukung dengan background study terkait potensi, permasalahan dan kebijakan pembangunan pariwisata. Tahapan penyusunan RIPPARKAB sebagai berikut:

1. Pembentukan kelompok kerja;
2. Pengumpulan data;
3. Penyusunan rancangan;
4. Uji publik; dan
5. Penetapan.

1.6. Jangka Waktu Perencanaan

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Wajo adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten untuk periode 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2025.

1.7. Sistematika Pelaporan

Pelaporan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Wajo dilakukan sedikitnya 4 (empat) kali dan dijadwalkan, sebagai berikut:

1. Laporan Pendahuluan

Laporan pendahuluan berisi tanggapan dan penjabaran terhadap Kerangka Acuan Kerja, yang menjelaskan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan, termasuk

pendekatan perencanaan, metodologi atau kerangka umum pelaksanaan pekerjaan.

Pelaporan pertama ini diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

2. Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan disampaikan setelah suatu tahap tertentu dilalui, diharapkan setidaknya sudah ada temuan dan analisis tentang potensi dan permasalahan kepariwisataan daerah, dan proyeksi awal.

Pelaporan kedua ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat perjanjian Kerjasama ditandatangani.

3. Rancangan Laporan Akhir

Laporan ini berisikan rumusan awal kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah untuk setiap aspek pengembangan, dilengkapi dengan peta, table, maupun gambar-gambar yang relevan.

Pelaporan ketiga ini diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat perjanjian Kerjasama ditandatangani.

4. Laporan Akhir

Berisikan rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah serta isi naskah akademik yang telah disepakati bersama.

Laporan akhir diselesaikan dalam jangka waktu sedikitnya 5 (lima) bulan sejak surat perjanjian Kerjasama ditandatangani, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang; maksud, tujuan dan sasaran; keluaran; ruang lingkup; metodologi; jangka waktu perencanaan dan sistematika pelaporan.

BAB 2 KEPARIWISATAAN KABUPATEN WAJO DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Berisi kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional; kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan; kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam kebijakan pembangunan wilayah.

BAB 3 KONDISI WILAYAH KABUPATEN WAJO DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Berisi kondisi fisik; sejarah sebagai potensi pariwisata; kekayaan ekologi sebagai potensi pariwisata; kondisi sosial budaya sebagai potensi pariwisata; perekonomian.

BAB 4 KABUPATEN WAJO SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

Berisi daya tarik dan sumber daya wisata Kabupaten Wajo; fasilitas pariwisata; fasilitas umum pendukung pariwisata; aksesibilitas pendukung pariwisata; prasarana umum pendukung pariwisata; penduduk sebagai potensi sumber daya manusia pariwisata.

BAB 5 INDUSTRI PARIWISATA

Berisi usaha pariwisata; usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata.

BAB 6 PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN

Berisi jumlah dan perkembangan pasar wisatawan; karakteristik pasar wisatawan; upaya pemasaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Wajo.

BAB 7 KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Berisi sumber daya manusia pariwisata; assosiasi pariwisata; kelembagaan pemerintah terkait pariwisata; kelembagaan lain terkait pariwisata.

BAB 8 PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Berisi tantangan dan isu strategis pembangunan kepariwisataan; prinsip pembangunan kepariwisataan; konsep pembangunan kepariwisataan; visi; misi; tujuan.

BAB 9 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Berisi kebijakan pembangunan kepariwisataan; strategi pembangunan kepariwisataan.

BAB 10 RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Berisi rencana struktur perwilayahan pariwisata; rencana kawasan pengembangan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata.

BAB 11 PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

BAB 2

KEPARIWISATAAN KABUPATEN WAJO DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN



2.1 Kepariwisataaan Kabupaten Wajo dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisataaan Nasional

Beberapa kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional yang diperkirakan cukup mempengaruhi industri kepariwisataan regional termasuk kepariwisataan Kabupaten Wajo, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Pengembangan kepariwisataan nasional mengacu pada landasan idiil (nilai-nilai agama dan Pancasila) dan landasan konstitusional (UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009) yang secara operasional dilaksanakan oleh para pelaku utama pengembangan kepariwisataan. Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menjadi dasar bagi pembangunan kepariwisataan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Paradigma dalam pembangunan daerah mengacu pada penerapan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2011

Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

“Terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;

3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan pembangunan kepariwisataan nasional adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. Mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
4. Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah peningkatan:

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara;
3. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara;
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan
5. Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan.

Arah pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan:

1. Dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 2. Dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 3. Dengan tata kelola yang baik;
 4. Secara terpadu lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 5. Dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016
- Proses Penyusunan mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi :
1. Landasan pembangunan Kepariwisata Indonesia.
 2. Muatan Materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA).
 3. Proses Penyusunan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
- Program dan kegiatan kepariwisataan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terdiri atas:
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata:
 - a) Pengelolaan daya tarik wisata Kab/Kota
 - 1) Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - 2) Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;

- 3) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota;
 - 4) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota.
- b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kab/Kota
- 1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 2) Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 5) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 7) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.
- c) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
- 1) Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 2) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 4) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;

- 5) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 7) Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- d) Penetapan TDUP Daerah Kab/Kota
- 1) Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 2) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengelolaan Investasi Pariwisata.
2. Program Pemasaran Pariwisata
- a) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- 1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri;
 - 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri;
 - 4) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- a) Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi,

Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
4. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
 - 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata;
 - 3) Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa);
 - 4) Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata;
 - 5) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif;
 - 6) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.

2.2 Kepariwisata Kabupaten Wajo dalam Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2030 merupakan Kebijakan Pembangunan Kepariwisata yang merupakan arahan umum

yang akan dijadikan landasan bagi langkah-langkah yang lebih operasional.

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

“Sulawesi Selatan Sebagai Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing di Indonesia dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”

Untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan destinasi wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah terjangkau, berwawasan lingkungan serta berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Mewujudkan kemitraan pengelolaan pariwisata yang mendorong berkembangnya industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan kehidupan masyarakat;
4. Mengembangkan kekayaan dan keragaman budaya serta merevitalisasi budaya maritim sebagai karakteristik entitas Daerah; dan
5. Mendorong perkembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah adalah:

1. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. Dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;

4. Dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
5. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan swasta.

2.3 Kepariwisata Kabupaten Wajo dalam Kebijakan Pembangunan Wilayah

a. RPJMD Kabupaten Wajo 2019-2024

Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

Karakteristik dan kondisi wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan **“Mangkalungu Ribulue, MassulappE RipottanangngE, Mattodang Ritasi Tappareng”** yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yakni:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta peternakan;
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan / tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat;
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah

timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo Tahun 2012–2032, menetapkan kawasan peruntukan yang terkait dengan pariwisata terdiri atas:

1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:
 - a) Kawasan Rumah Adat Atakkae di Kecamatan Tempe;
 - b) Kawasan situs Geddong'E di Kecamatan Pammana; dan
 - c) Kawasan Situs Makam Raja-Raja di Kecamatan Majauleng
2. Kawasan peruntukan pariwisata alam, terdiri atas:
 - a) Gua Nippon di Kecamatan Tempe;
 - b) Taman Wisata Danau Tempe di Kecamatan Tempe;
 - c) Permandian alam di Kecamatan Maniangpajo; dan
 - d) Tanjung Tanah Merah Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla.
3. Kawasan peruntukan pariwisata buatan, terdiri atas:
 - a) Kawasan Bendungan Kalola di Kecamatan Maniangpajo;
 - b) Kawasan Tepian Sungai CenranaE di Kecamatan Tempe;
 - c) Kawasan Agrowisata Sutera SempangE Desa Pakkanna di Kecamatan Tanasitolo.
4. Kawasan **Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**, terdiri atas:
 - a) Kawasan cagar alam laut, ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 hektar;

- b) Kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla;
 - c) Kawasan wisata alam ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan
 - d) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe, situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana, situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe, Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng, kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging.
5. Kawasan wisata berburu merupakan kawasan yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 hektar.

BAB 3
KONDISI WILAYAH KABUPATEN WAJO DALAM
MENDUKUNG PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN



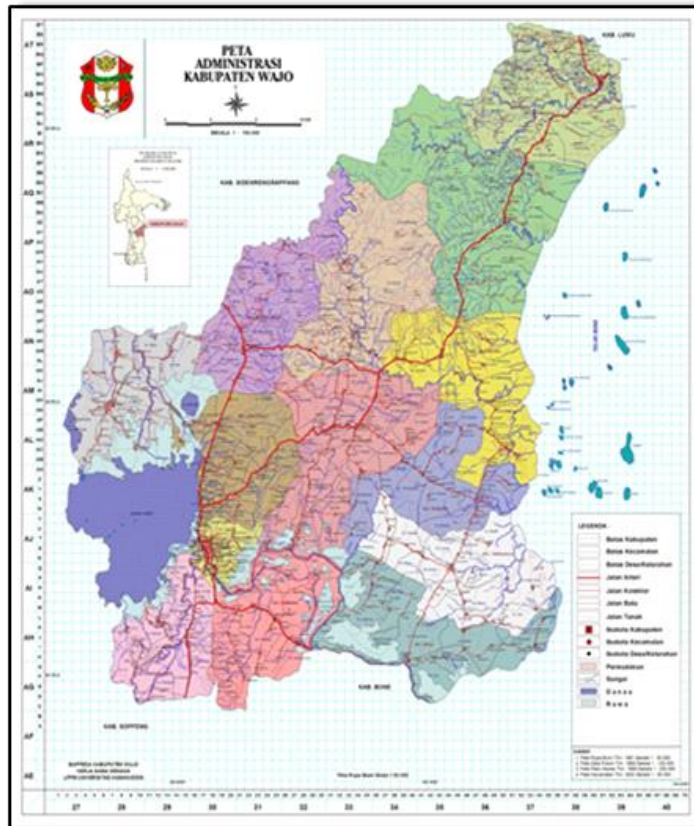
3.1. Kondisi Fisik

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Wajo memiliki wilayah seluas 2.506,19 km² atau 4,01 % dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan salah satu dari 24 (dua puluh empat) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas wilayah administrasi Kabupaten Wajo sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone dan Soppeng,
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Soppeng dan Sidrap

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1.

Peta Administrasi Kabupaten Wajo

(Sumber: Bappeda Kabupaten Wajo, 2018)

Secara administratif Kabupaten Wajo terdiri atas 14 wilayah Kecamatan yang terdiri dari 190 Desa/Kelurahan meliputi 48 Kelurahan dan 142 Desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Keera (368.36 Km² atau 14,7%), dan yang tersempit adalah Kecamatan Tempe (38,27 Km² atau 1,53%), sedangkan Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan terbanyak di Kecamatan Pitumpanua (27 desa/kelurahan) dan yang tersedikit adalah Kecamatan Maniangpajo (8 desa/kelurahan). Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian administrasi Kabupaten Wajo dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1.
Wilayah Kabupaten Wajo Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan		
				Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Sabbangparu	137.75	5.3	12	3	15
2	Tempe	38.27	1.53	0	16	16
3	Pammana	162.1	6.47	14	2	16
4	Bola	220.13	8.78	10	1	11
5	Takkalalla	179.76	7.17	11	2	13
6	Sajoanging	167.01	6.66	6	3	9
7	Penrang	154.9	6.18	9	1	10
8	Majauleng	225.92	9.01	14	4	18
9	Tanasitolo	154.6	6.17	15	4	19
10	Belawa	172.3	6.88	6	3	9
11	Maniangpajo	175.96	7.02	5	3	8
12	Gilireng	147	5.87	8	1	9
13	Keera	368.36	14.7	9	1	10
14	Pitumpanua	207.13	8.26	23	4	27
Jumlah		2,506.19	100	142	48	190

Sumber : Wajo Dalam Angka 2020. BPS. 2020 (Diolah)

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Wajo secara geografis terbentang mulai 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119° 53' - 120°27' Bujur Timur. Apabila di lihat secara geostrategis regional Pulau Sulawesi, maka Kabupaten Wajo yang berada pada bagian selatan merupakan daerah yang dilewati jalur transportasi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi strategis tersebut dapat membawa dampak bagi eksistensi Kabupaten Wajo terhadap mobilitas baik barang/jasa maupun orang. Posisi Kabupaten Wajo dengan ibukotanya di Sengkang, merupakan daerah transit, dengan akses penghubung ke daerah-daerah lain yang berpusat pada wilayah strategis baik di Provinsi Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu, Kota Pare-pare, dan Kabupaten Toraja.

c. Topografi

Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 0 hingga 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur, selatan, tengah, dan barat. Danau Tempe terletak di bagian barat sedangkan pesisir pantai membentang di sebelah timur menghadap Teluk Bone sepanjang 103 km garis pantai.

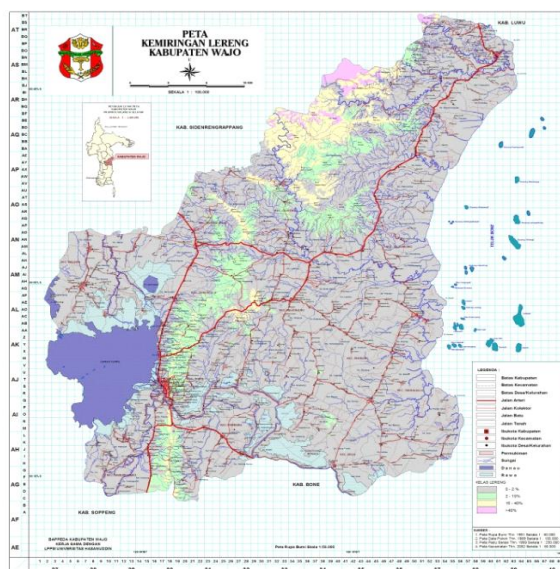
Karakteristik dan kondisi wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai daerah yang terbaring dengan posisi yang dikatakan **“Mangkalungu Ribulue, MassulappE RipottanangngE, Mattodang Ritasi Tappareng”** yang artinya Kabupaten Wajo memiliki lahan 3 (tiga) dimensi yakni:

1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke utara yang semakin bergunung utamanya di Kecamatan Maniangepajo dan Kecamatan Pitumpanua yang merupakan wilayah pengembangan hutan tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta peternakan;
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan perkebunan / tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat;
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut yang terbentang sepanjang pesisir pantai Teluk Bone di sebelah timur merupakan wilayah potensial untuk pengembangan perikanan dan budidaya tambak;

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo cukup bervariasi mulai dari datar, bergelombang hingga berbukit, yang mana terdiri dari:

1. Sebagian besar bentuk wilayahnya tergolong datar dengan kemiringan lahan/lereng 0 – 2% luasnya mencapai 212.341 Ha atau sekitar 84%;
2. Lahan datar hingga bergelombang dengan kemiringan/ lereng 3 – 15% luas 21.116 Ha (8,43%);
3. Lahan yang berbukit dengan kemiringan/ lereng di atas 16 - 40% luas 13.752 Ha (5,50%); dan
4. Kemiringan lahan di atas 40% (bergunung) hanya memiliki luas 3.316 Ha (1,32%;

Sedangkan kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta kemiringan lahan sebagai berikut.



Gambar 3.2.

Peta Kemiringan Kabupaten Wajo

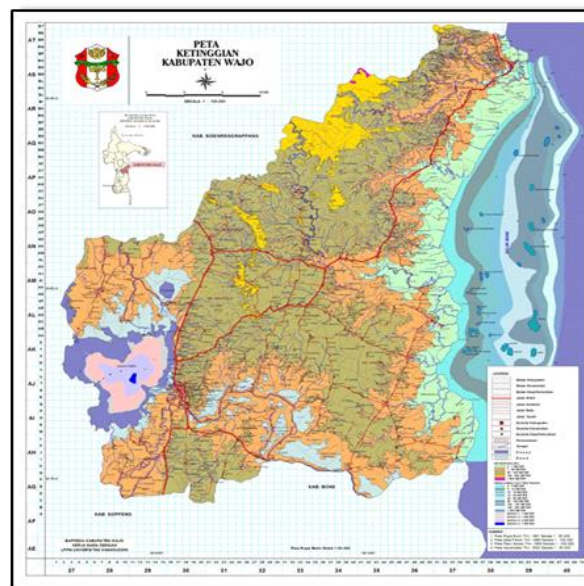
Sumber : Bappeda Kabupaten Wajo, 2018

Secara morfologis, Kabupaten Wajo mempunyai ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut:

1. 0 – 7 meter, luas 57.263 Ha atau sekitar 22,85%;
2. 8 – 25 meter, luas 94.539 Ha atau sekita 37,72%;

3. 26 – 100 meter, luas 87.419 Ha atau sekitar 34,90%;
4. 101 – 500 meter, luas 11.231 Ha atau sekitar 4,50%, dan;
5. Ketinggian di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66%.

Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi ketinggian di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta ketinggian di Kabupaten Wajo sebagai berikut.



Gambar 3.3.

Peta Ketinggian Kabupaten Wajo

Sumber : Bappeda Kabupaten Wajo, 2018

d. Geologi

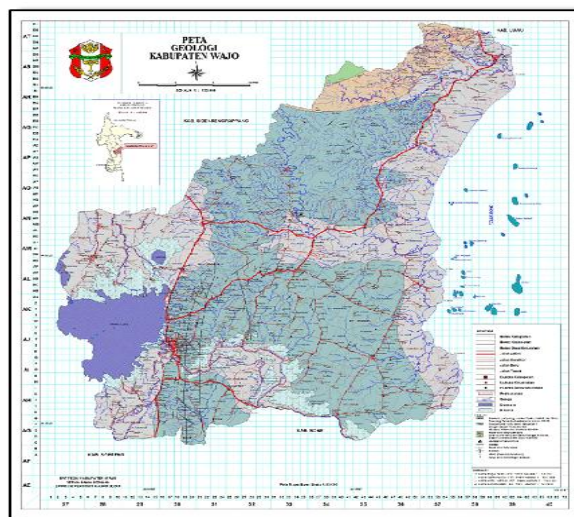
Berdasarkan informasi dari peta geologi Indonesia skala 1 : 100.000, Kabupaten Wajo mempunyai struktur batuan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis batuan induk, yaitu:

1. Daerah berstruktur batuan aliran lava tersusun basal hingga andesit, breksi vulkanik dan batu pasir vulkanik. Struktur batuan ini terdapat pada bagian utara Kabupaten Wajo yang merupakan daerah aliran lava dari Gn. Rante Kambola yang berada di Kabupaten Tanatoraja dengan ketinggian 500 meter

di atas permukaan laut. Sedangkan daerah dengan berstruktur batuan Napal dan batu Gamping terdapat di daerah bawah yang berstruktur batuan aliran lava atau tepatnya berada di Kecamatan Pitumpanua.

2. Daerah berstruktur batuan konglomerasi batu pasir glaukonit dengan serpih kaquina dan moluska yang mempunyai ketebalan 100 – 500 meter. Struktur tanah ini terdapat pada bagian tengah di Wilayah Kabupaten Wajo dan mempunyai luasan paling besar;
3. Daerah aluvial yang berasal selain dari hasil sedimentasi tersebar di sepanjang pantai yang berasal dari angkutan sedimen air sungai/danau;

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis tanah di Kabupaten Wajo dapat di lihat pada gambar peta jenis tanah di Kabupaten Wajo sebagai berikut.



Gambar 3.4.

Peta Jenis Tanah Kabupaten Wajo

Sumber : Bappeda Kabupaten Wajo, 2018

Selanjutnya menurut peta eksplorasi Sulawesi Selatan, jenis tanah di Kabupaten Wajo terdiri dari:

1. Alluvial : Jenis tanah ini tersebar di seluruh Kecamatan
2. Clay : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Pammana dan Takkalalla.
3. Podsolik : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Maniangpajo, Tanasitolo, Tempe, Sajoanging, Majauleng, Belawa dan Pitumpanua.
4. Mediteran : Jenis tanah ini terdapat pada Kecamatan Tempe, Tanasitolo, Maniangpajo, Pammana dan Belawa.
5. Grumosol : Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sabbangparu dan Pammana.

e. Hidrologi

Kabupaten Wajo memiliki potensi hidrologi yang meliputi daerah aliran sungai, danau, danau/rawa dan air tanah. Pada daerah irigasi di Kabupaten Wajo, terdapat 3 (tiga) kewenangan/tanggung jawab pengelolaannya, yaitu wewenang/tanggungjawab pusat dengan keluasan 9.641 terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di 2 (dua) desa dan 2 (dua) kecamatan; wewenang dan tanggungjawab Provinsi Sulawesi Selatan dengan keluasan 3.037 Terdiri dari 2 (dua) daerah irigasi di satu desa dan satu kecamatan; dan wewenang dan tanggungjawab Kabupaten Wajo dengan keluasan 17.504 terdiri dari 126 daerah irigasi di 2 (dua) desa/kelurahan tersebar di 14 kecamatan.

f. Klimatologi

Kabupaten Wajo sebagaimana daerah lainnya di Indonesia beriklim tropis dengan suhu kurang lebih 27°C – 30°C. yang tandai dengan adanya bulan kering/musim hujan dan bulan basah/ musim kemarau. Musim hujan setiap tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 bulan pada bulan April sampai dengan bulan Juni, kecuali di bagian utara yaitu

di Kecamatan Pitumpanua terdapat musim hujan mirip dengan Kabupaten Luwu serta bulan-bulan selanjutnya adalah lembab. Sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Antara bulan November sampai dengan Bulan Maret terdapat curah hujan yang cukup akibat pengaruh musim hujan di bagian selatan Sulawesi Selatan. Curah hujan untuk 3 tahun terakhir mencapai rata-rata 1.510 mm dan 128 hari hujan.

3.2 Sejarah Sebagai Potensi Pariwisata

Kerajaan Wajo merupakan salah satu kerajaan penting di masa lalu di kawasan Sulawesi Selatan. Sekalipun sudah melebur menjadi bagian dari NKRI, keberadaan kerajaan Wajo masih bisa ditelusuri baik dari adanya perkumpulan orang-orang keturunan kerajaan, benda-benda peninggalan kerajaan, naskah lontaraq, serta tempat-tempat bersejarah yang menjadi bukti keberadaan kerajaan ini.

Kerajaan Wajo dari mulai berdirinya di abad 14 hingga melebur ke dalam NKRI di abad 20 menunjukkan bahwa kerajaan ini mampu bertahan dalam waktu yang lama yaitu sekitar 600 tahun. Usia yang sangat panjang ini tentu memiliki kekayaan nilai-nilai yang menjadikannya mampu bertahan begitu lama. Salah satunya adalah nilai kemerdekaan orang Wajo dan pengangkatan raja berdasarkan pemilihan. Raja juga dapat diberhentikan. Kekuasaan raja tidak absolut/mutlak karena dibatasi oleh kekuasaan dari para pejabat lain. Kekuasaan kerajaan yang terbagi di beberapa pemegang kekuasaan ini menjadi kunci Kerajaan Wajo mampu bertahan lama.

Jejak sejarah kerajaan Wajo tampak dari adanya tempat-tempat bersejarah dan benda-benda peninggalan Kerajaan Wajo yang hingga sekarang masih ada dan dapat dikunjungi :

a. Makam Raja-raja di Tosora di Kecamatan Majauleng

Beberapa tempat penting yaitu desa Tosora di Kecamatan Majauleng yang merupakan pusat pemerintahan Kerajaan Wajo. Di tempat ini terdapat makam Arung Matowa X. Arung Matowa XXIII, Arung Matowa XXX.

Kompleks makam Arung Benteng Pola berada di sisi barat Mesjid Tua Tosora. Kompleks makam ini berada pada ketinggian 30,6 m dpl. Terdapat 12 makam yang terlihat. Sebagian makam tersebut sudah tidak memiliki jirat. Bentuk nisan yang terlihat terdiri dari meriam, mahkota dan pipih. Kompleks makam La Tenrilai To Sengeng berada tidak jauh dari mesjid tua Tosora. Kompleks makam La Maungkace To U' damang berada di luar benteng sisi utara.

b. Makam Lataddampare' Puangrimaggalatung

Makam Lataddampare' Puangrimaggalatung disebut dalam lontara bahwa Lataddampare' Puangrimaggalatung adalah seorang ahli pikir dijamannya, dia juga seorang Negarawan, ahli strategi perang, ahli dibidang pertanian dan ahli hukum. Kejujurannya menjalankan pemerintahan terkenal baik di dalam maupun di luar negeri. Beliau adalah arung Matowa wajo ke 4 yang berhasil menjadikan wajo sebagai sebuah kerajaan yang besar dan makmur kira-kira tahun 1498 sampai 1528

c. Makam La Maddukelleng

La Maddukelleng adalah putera dari arung peneki La Mataesso To' Ma'dettia dan We Tenriangka Arung Singkang, saudara Arung Matowa La salewengeng To Tenrirua. Komplek makam Pahlawan Nasional Lamaddukelleng yang terletak sekitar 200-an meter arah selatan Lapangan Merdeka di Kota Sengkang, ibukota Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

d. Mushallah Tua Menge

Mushallah Tua Menge dibangun sekitar tahun 1621 M. Setelah selesai mesjid Tua Tosora dibangun. Perjalanan sejarah Islam sejak masuknya hingga sekarang cukup banyak mencatat kenangan yang tak mudah dilupakan. Dalam sejarah masuknya Islam di Wajo sekitar tahun 1610 M. Agama islam berkembang terus sampai sekarang. Mushallah Tua yang dibangun pada tahun yang sama masa pembangunan mesjid Tua Tosora tercatat ada tujuh buah dengan bahan baku yang sama yaitu batu gunung, pasir, dan telur.

Besarnya animo masyarakat menerima agama Islam tanpa mengalami hambatan. Mereka menerima kebenaran Islam sesungguhnya. Bangunan Mushallah selalu dimanfaatkan setiap waktu sholat, mereka berjamaah bersama.

Mushallah Tua Menge ukuran bangunannya lebih kecil dari ukuran bangunan Mesjid Tua. Fisik bangunan Mushallah Tua ini hanya berukuran 10m x 9,5m. Jarak antara Mesjid Tua dengan Mushallah kurang lebih 100m dari arah Timur.

e. Saoraja Mallangga

Saoraja merupakan rumah tempat menyimpan benda-benda pusaka milik kerajaan. Benda pusaka peninggalan kerajaan tersebut disimpan di Saoraja atau rumah raja (istana). Salah satu Saoraja yang dijadikan museum di Kabupaten berjuluk Bumi Lamaddukelleng ini, yakni Saoraja Mallangga museum simettengpola. Keberadaan Saoraja ini menjadi bukti sejarah kerajaan Wajo. Tidak sulit untuk menemukan museum ini. Terletak di Jl Ahmad Yani Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Saoraja ini dibangun sekitar tahun 1930, pada era Ranreng Bettengpola ke-26, Datu Makkaraka yang juga dikenal sebagai ahli lontara.

Saat ini, Saoraja tersebut di huni oleh salah seorang putra Datu Makkaraka, yakni H Datu Sangkuru, 79 yang bergelar Ranreng Bettengpola ke-27 bersama beberapa orang anaknya. Kini di Museum ini sering pula dimanfaatkan sebagai tempat untuk pagelaran seni tradisional Wajo, seperti Massure yaitu seni yang bercerita dalam bahasa bugis lontara dan diiringi musik tradisional. Berbagai barang-barang peninggalan Arung Bettengpola yang dipajang di museum ini, seperti peralatan upacara adat, peralatan dapur, keramik antik, Serta berbagai jenis keris dan tombak. Dalam struktur monarki konstitusional di Kerajaan Wajo, Arung Bettempola adalah pejabat yang memimpin pemilihan seseorang diangkat sebagai Arung Matowa.

f. Masjid Tua Tosora

Mesjid Tua Tosora merupakan mesjid raya yang pertama dibangun di wilayah Kerajaan Wajo, oleh Arung Matowa Wajo XV La Pakallongi To Allinrunji pada tahun 1621. Sisa bangunan yang masih tampak adalah bagian mihrab (ceruk) di sisi barat yang masih utuh, sedangkan bagian dinding lainnya tinggal pondasinya. Masjid ini berdenah bujur sangkar terbuat dari batu yang disusun dengan ukuran, panjang 18,20 meter, lebar 15,90 meter, tinggi tembok 3,70 m, dan tebal tembok 53 cm, pintu pada bangunan ini berada disebelah timur.

g. Bangunan Geddong (Gudang Amunisi)

Gudang amunisi ini dibangun pada masa pemerintahan Arung Matowa Wajo XXX La Salawengngeng To Tenrirura (1715 – 1736), Gudang dibangun dalam rangka menghadapi serangan Belanda. Gedong sebanyak tiga buah yang terletak di masing-masing limpo, yaitu di Tolotenreng, Tua, dan Bettempola. Gedong yang terdapat di wilayah Bettempola, yaitu di pusat Kerajaan Wajo, Tosora. Letaknya di Dusun Menge yang berada pada

ketinggian 20,8 m dpl, di sebelah timur terdapat bangunan Musallah dan di sebelah baratnya terdapat Danau Seppengge dan pelabuhan tua. Dinding bangunan pada sisi timur masih tampak berdiri tegak, sedangkan sisi lainnya sudah hancur dan tinggal pondasinya. Denah bangunan berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 8,50 m, lebar 5,00 m, tinggi dinding 3,15 m, dan tebal dinding 0,61 m. Bahan dan teknik bangunan sama dengan bangunan Mesjid Tua dan Musallah. Pada sisi utara terdapat sebuah meriam, dengan ukuran panjang 2,54 m, diameter 0,42 m, dan diameter lop 0,16 m.

h. Benteng Pertahanan

Pembangunan benteng pertama kali dibuat oleh Arung Matowa Wajo XVIII La Tenrilai To U'damang (1636 – 1639), kemudian diteruskan oleh penggantinya Arung Matowa Wajo XIX La Isigajang To Bune (1639 – 1643) (Patunru, 1983). Benteng yang masih tampak diamati yaitu di sebelah utara dan selatan, yang memanjang timur-barat. Kedaan benteng pada umumnya sudah hancur, baik yang diakibatkan oleh peperangan, faktor alam (erosi), maupun oleh aktivitas manusia sekarang. Benteng tersebut terbuat dari tanah, dengan ukuran tinggi 8 m, lebar atas 3 m, lebar dasar 15 m. Pada sisi luarnya dibuat parit, dengan ukuran lebar 6 m, dalam 4 m. Benteng yang ada di sisi utara panjangnya 2 km, dengan lima bastion, sedangkan benteng yang ada di sisi selatan panjangnya sekitar 1 km dengan dua bastion pada masing-masing ujungnya. Sebahagian dari benteng tersebut tidak dapat lagi diamati, karena sudah rata dengan tanah di sekitarnya.

3.3 Kekayaan Ekologis Sebagai Potensi Pariwisata

Kekayaan sumberdaya alam dan lingkungan yang melimpah telah dimiliki oleh negara Indonesia. Sumber daya alam adalah

segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Kawasan lindung terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya.

Penggunaan lahan di Kabupaten Wajo tahun 2017 pada luas lahan kering meliputi Tegal/Kebun seluas 36.706 Ha, Ladang / Huma seluas 12,177 Ha, Perkebunan seluas 29.413 Ha, Tanah Tanaman Kayu-Kayuan Hutan Rakyat seluas 7,226 Ha, Pengembalaan / Padang Rumput seluas 10,655 Ha, Lahan Sementara Tidak Diusahakan seluas 7.780 Ha, Lain-lain (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara) seluas 21,401 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian seluas 24.517 Ha.

a. Kawasan Hutan Lindung

Merupakan kawasan yang ditetapkan dengan tujuan mencegah erosi dan sedimentasi serta menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla, Kecamatan Penrang dan Kecamatan Sajoanging dengan luasan kurang lebih 7.679,93 hektar.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan sempadan pantai ditetapkan di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla, dengan ketentuan:

- 1) Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
- 2) Daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.

Kawasan sempadan sungai, ditetapkan di Sungai Walanae, Sungai Bila, Sungai Gilireng, Sungai Siwa, Sungai Awo, Sungai Keera, dan Sungai Cenrana'E dengan ketentuan:

- 1) Daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- 2) Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 meter dari tepi sungai; dan
- 3) Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 meter dari tepi sungai.

Kawasan sekitar danau atau waduk, ditetapkan di Danau Tempe Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Labuaja Kecamatan Sabbangparu, Kawasan Rawa Lampullung Kecamatan Tempe, Kawasan Rawa Tosora Kecamatan Majauleng, dan Kawasan Bendungan Kalola Kecamatan Maniangpajo, dan Kawasan Bendung Paselloreng di Kecamatan Gilireng dengan ketentuan:

- 1) Daratan dengan jarak paling sedikit 50 meter sampai dengan 100 meter dari titik pasang air danau atau waduk tertinggi; atau

- 2) Daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau atau waduk.

Kawasan ruang terbuka hijau, berupa Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat paling sedikit 10% dari luas kawasan perkotaan yaitu PKL, PKLp dan PPK.

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- 1) Kawasan cagar alam laut, ditetapkan di Kawasan Pantai Timur (Tanjung Tanah Merah) Desa Pantai Timur di Kecamatan Takkalalla dengan luasan kurang lebih 125 hektar;
- 2) Kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan di Kecamatan Pitumpanua, Kecamatan Keera, Kecamatan Sajoanging, Kecamatan Bola, Kecamatan Penrang, dan Kecamatan Takkalalla;
- 3) Kawasan wisata alam ditetapkan di Kawasan Danau Tempe Kecamatan Tempe, kawasan permandian Kalola Kecamatan Maniangpajo dan awo Kecamatan Gilireng; dan
- 4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pegetahuan ditetapkan di Kawasan Gua Nippon di Kecamatan Tempe, situs Geddong'E di Desa Lagosi Kecamatan Pammana, situs makam raja-raja Wajo di Kelurahan Maddukelleng Kecamatan Tempe, Kawasan Desa Tosora di Kecamatan Majauleng, kawasan rumah adat Atakkae di Kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe dan Makam Sultan Kutai di Akkotengeng Kecamatan Sajoanging.

d. Kawasan Lindung Lainnya

- 1) Kawasan wisata berburu merupakan kawasan yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kesinambungan kegiatan berburu dan kelestarian satwa dengan mengutamakan aspek rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa ditetapkan di Kawasan Bendungan Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo dengan luasan kurang lebih 500 hektar;
- 2) Kawasan pengungsian satwa merupakan kawasan yang dikembangkan dalam rangka kepentingan kelestarian satwa ditetapkan di sebagian Kecamatan Maniangpajo, sebagian Kecamatan Gilireng, sebagian Kecamatan Keera dan sebagian Kecamatan Majauleng.

3.4. Kondisi Sosial Budaya Sebagai Potensi Pariwisata

Kondisi sosial budaya masyarakat Wajo hidup dan berkembang subur di tengah-tengah masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur dan menjunjung tinggi budaya yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal ini tercermin masih dilakukannya upacara-upacara ritual dengan masyarakat yang memegang teguh semangat kerakyatan dan gotong royong yang menjadi ciri bagi masyarakat Kabupaten Wajo.

Dalam proses pengembangan pariwisata masyarakat wajo sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budaya. Masyarakat Wajo menghindari hiburan yang dapat berdampak negatif, kehidupan malam dan sangat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Beberapa kegiatan sosial budaya yang masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Wajo, diantaranya:

- a. Maddoja Bine, merupakan suatu tradisi masyarakat petani berjaga di malam hari menunggu benih padi yang diperam, sebelum ditabur dipersemaian keesokan harinya. Ritual ini dilakukan sejak nenek moyang dahulu dan dilakukan secara turun temurun sampai sekarang. Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Sanging Serri (dewi padi) sebagai wujud penjelmaan manusia.

Masyarakat terdahulu melakukan ritual ini secara rutin sebelum menanam di sawah, agar padi tumbuh subur dan kelak hasil panen melimpah dan berhasil. Pada ritual ini, masyarakat berbondong-bondong membawa ragam makanan dan kue tradisional serta hasil bumi sebagai sajian dalam ritual tersebut. Adapula ritual lainnya yang mengiringi ritual Maddoja Bine diantaranya Mappadendang dan Massure'.

- b. Massure adalah tradisi lisan dan sangat tua dan sezaman dengan manusianya yang merupakan penuturan naskah I La Galigo dengan cara bertutur tanpa dibarengi alat musik. Massure' biasa dilakukan pada pesta pernikahan, pindah rumah baru dan "mappenre tojang" (aqiqah). Massure' dilakukan oleh perseorangan baik pria maupun wanita. Tradisi massure' merupakan karya sastra orang Bugis yang sudah dikenal selama berabad-abad, aslinya ditulis pada daun lontar yang berisikan petuah, cerita atau perumpamaan.
- c. Ana Masyari merupakan tradisi yang menampilkan suatu kelompok kesenian pada zaman dahulu yang karena adanya pengaruh perkembangan agama Islam sehingga dipentaskan oleh laki-laki berpenampilan menyerupai wanita. Kelompok ini menampilkan lagu dan tarian yang diiringi dengan musik

tradisional. Tradisi ini merupakan sarana hiburan yang ditampilkan pada saat setelah panen selesai, pada pesta pernikahan maupun perhelatan lainnya.

3.5 Perekonomian



Sumber : Wajo Dalam Angka 2020, BPS (Diolah) Tahun 2020

Kinerja pembangunan ekonomi dapat diukur dengan salah satu indikator perekonomian secara makro adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu di bandingkan dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. PDRB terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu PDRB Atas Harga Konstan dan PDRB Atas Harga Berlaku. Dimana nilai PDRB yang digunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. Penggunaan nilai atas dasar harga konstan ini karena telah dikeluarkannya pengaruh perubahan harga sehingga perubahan yang di ukur merupakan pertumbuhan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Wajo sejak tahun 2015-2019, khususnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK Tahun 2010) Kabupaten Wajo senantiasa mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2019 tumbuh sebesar 12.858.45 milyar rupiah yang relatif jauh lebih

besar bila dibandingkan pada tahun 2015 yang sebesar 11.071,65 milyar rupiah.

Berikut tabel PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2015–2019 di Kabupaten Wajo

Tabel 3.2
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Wajo
Tahun 2015 - 2019 ADHK (%)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,79	8,58	6,02	1,70	-1,76
B	Pertambangan dan Penggalian	9,27	-4,55	-0,07	-15,33	8,30
C	Industri Pengolahan	6,86	7,79	6,3	5,57	4,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,96	6,04	5,36	6,98	7,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,82	3,37	6,96	8,08	5,36
F	Konstruksi	7,75	6,34	6,09	5,94	3,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	8,81	7,93	8,18	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	6,64	5,03	7,21	9,6	9,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,93	7,69	8,31	10,64	6,40
J	Informasi dan Komunikasi	9,96	9,36	10,87	11,74	10,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,86	15,41	2,25	1,69	0,60
L	Real Estate	8,53	6,57	6,12	5,32	5,90

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
M, N	Jasa Perusahaan	5,46	7,76	7,89	10,84	10,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,69	-1,25	4,68	5,91	14,68
P	Jasa Pendidikan	8,14	7,62	8,71	9,51	6,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,66	7,8	8,65	9,22	8,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	7,11	8,63	11,56	12,95	7,78
	PDRB	7,06	4,96	5,21	1,08	4,06

Sumber: Wajo Dalam Angka 2020, BPS (Diolah) Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa selama tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo sebesar 4,06 persen. Perekonomian Kabupaten Wajo pada tahun 2019 tersebut tumbuh pesat dibanding tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2019 meroket sebesar 2,98 poin dibanding tahun 2018 yang tercatat 1,08 persen. Perlambatan ekonomi Kabupaten Wajo tahun 2018 diakibatkan oleh pertumbuhan negatif (kontraksi) yang cukup dalam pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Lapangan usaha tersebut mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif 15,33 persen tahun 2018 sebagai dampak dari turunnya produksi gas alam tahun 2018. Disamping itu, melambatnya pertumbuhan lapangan usaha Pertanian yang dikarenakan terjadinya gagal panen di beberapa tempat, Kehutanan dan Perikanan yang juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo secara total. Tahun 2018, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan perikanan hanya tumbuh 1,68 persen.

Namun demikian, lapangan usaha lainnya mampu menahan gejolak pertumbuhan negatif pada lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 12,95 persen, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 11,74 persen. Selanjutnya Jasa Perusahaan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Pengadaan Air mampu tumbuh pada kisaran 8 hingga 10 persen tahun 2018.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Wajo
Tahun 2015 – 2019 (Persentase)

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,97	34,54	35,05	34,67	32,60
B	Pertambangan dan Penggalian	20,36	17,32	15,91	13,58	14,38
C	Industri Pengolahan	3,6	3,71	3,87	4,03	4,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,46	9,58	9,76	10,16	10,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,62	14,75	15,01	16,07	16,47
H	Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,2	3,16	3,35	3,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,32	0,33	0,35	0,36
J	Informasi dan Komunikasi	1,3	1,34	1,44	1,57	1,66

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33	2,52	2,5	2,52	2,45
L	Real Estate	3,31	3,41	3,42	3,54	3,59
M,N	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	3,87	3,84	4	4,43
P	Jasa Pendidikan	3,32	3,4	3,57	3,86	3,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,37	1,43	1,48	1,6	1,67
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,4	0,41	0,44	0,48	0,50
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Wajo Dalam Angka 2020, BPS (Diolah) Tahun 2020

Memasuki tahun 2019 perekonomian Kabupaten Wajo tampak mengalami perkembangan positif sebesar 4,06 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 perkembangan ini lebih melambat. Hal ini disebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Di mana sektor pertanian sangat dominan atas pembentukan PDRB Kabupaten Wajo. Sektor Pertanian menyumbang sebesar 34,67 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Selanjutnya Sektor Perdagangan merupakan andalan kedua Kabupaten Wajo yang menyumbang sebesar 16,07 persen terhadap total PDRB Kabupaten Wajo. Sedangkan Sektor Jasa - jasa hanya menyumbang sebesar 8,58 persen. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun dalam kurun periode tahun 2015 hingga 2019 tercatat sebesar 5,88 persen.

BAB 4

KABUPATEN WAJO SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA



Kabupaten Wajo memiliki potensi yang cukup besar dalam hal kepariwisataan. Dari kondisi geografis, Kabupaten Wajo memiliki letak yang cukup strategis dengan kondisi alam yang bervariasi mulai dari daerah pesisir pantai, daratan tinggi, danau dan lainnya. Selain itu Kabupaten Wajo memiliki kebudayaan yang sangat menarik untuk dijadikan potensi pengembangan pariwisata. Pada bab ini hanya menjelaskan objek wisata dan jenis kesenian di Kabupaten Wajo yang telah dipasarkan dan punya prospek untuk dikembangkan yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

4.1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata

4.1.1 Danau Tempe

Danau Tempe terletak di Kecamatan Tempe. Danau Tempe adalah salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan yang banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Danau yang luasnya 13.000 hektar ini, jika dilihat dari ketinggian tampak bagaikan sebuah baskom raksasa. Danau ini menjadi

sumber penghidupan, mencari ikan, tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Wajo, tapi juga sebagian masyarakat Kabupaten Soppeng dan Sidrap.

Disetiap tanggal 23 Agustus diadakan festival Danau Tempe atau juga sering disebut Maccera Tappareng (mensucikan danau). Disepanjang tepi danau, tampak perkampungan nelayan bernuansa Bugis berjejer menghadap ke arah danau.



Danau Tempe merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di dunia, karena dasar danau ini menyimpan banyak sumber makanan ikan. Selain itu, danau ini juga memiliki spesies ikan tawar yang tidak dapat ditemui di tempat lain. Hal ini diperkirakan karena letak danau ini berada di atas lempengan Benua Australia dan Asia.

Ditengah-tengah Danau Tempe, tampak ratusan rumah terapung milik nelayan yang berjejer dengan dihiasi bendera yang berwarna-warni. Dari atas rumah terapung itu, wisatawan dapat menyaksikan terbit dan terbenamnya matahari di satu posisi yang sama, serta menyaksikan beragam satwa burung, bunga-bunga, dan rumput air yang terapung diatas permukaan air. Di malam hari, para pengunjung dapat menyaksikan indahnya rembulan yang menerangi Danau Tempe sambil memancing ikan.

Maccera tappareng ditandai dengan pemotongan sapi yang dipimpin oleh ketua nelayan setempat. Dalam acara ini, para pengunjung dapat menyaksikan berbagai atraksi wisata yang sangat menarik, seperti lomba perahu tradisional, perahu hias, permainan rakyat (misalnya, lomba layangan), pemilihan ana dara (gadis) dan kallolona (pemuda) Tanah wajo, pendendang (menabuh lesung), pegelaran musik tradisional dan tari bissu yang dimainkan oleh para waria, dan berbagai pegelaran tradisional lainnya. Pelaksanaan festival ini dimaksudkan agar nuansa kekeluargaan dan persatuan antar sesama nelayan tetap terjaga dengan prinsip yaitu Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebbi (saling menyayangi, saling menasehati, dan saling menghargai). Dengan menyaksikan festival ini, para pengunjung dapat mengetahui tentang kebudayaan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, khususnya Bugis Wajo.

Di kawasan Danau Tempe juga terdapat daya tarik wisata lain seperti:

- Wisata Tepian Sungai Walenae
- Paddupa
- Bendungan Gerak

Tiga objek wisata ini juga memiliki daya tarik tersendiri. Wisata Tepian Sungai Walenae Paddupa merupakan tempat berkumpulnya masyarakat untuk menikmati malam di kawasan Danau Tempe. Tempat ini menjadi *meeting point* bagi masyarakat Wajo. Di kawasan ini terdapat juga Pusat Kuliner Paddupa yang ramai dikunjungi untuk menikmati masakan khas Wajo. Lokasi ini sangat potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Pembangunan Bendungan Bergerak sebenarnya dimanfaatkan sebagai pola pengaturan debit air Danau Tempe,

irigasi dan pembangkit listrik. Tapi besarnya potensi keindahan alam dari bendungan ini akan menjadi potensi wisata terbaik bagi Kabupaten Wajo. Disekitar bendungan akan dapat dimanfaatkan sebagai sarana wisata air seperti Water Park dan lainnya.

Danau ini terletak 7 KM dari kota Sengkang, ibukota Kabupaten Wajo. Untuk mencapai tempat ini, dari Kota Sengkang ke Sungai Walenae dapat ditempuh melalui jalur darat dengan menggunakan mobil pete-pete (mikrolet). Dari Sungai Walenae menuju ke Danau Tempe ditempuh menggunakan perahu motor atau katinting, dengan biaya sekitar Rp. 150.000/Perahu.

4.1.2 Perumahan Adat Attakae



Perumahan adat Attakae terdapat di pinggir Danau Lampulung, kelurahan Atakkae Kecamatan Tempe sekitar 3 Km sebelah Timur Kota Sengkang dan dibangun pada Tahun 1995. Kawasan ini merupakan gambaran sebuah perkampungan Bugis dimana terdapat duplikat rumah tradisional yang dihimpun dari berbagai kecamatan sehingga kawasan ini representative sebagai tempat pelaksanaan pameran, seminar dan antraksi budaya permainan rakyat.

Hal yang cukup menarik dalam kawasan ini adalah Rumah adat yang cukup besar yang dijuluki istana “Saoraja La Tenribali”

salah seorang Raja Arung Matowa Wajo. Rumah adat ini memiliki tiang kayu ulin sebanyak 101 buah yang sengaja didatangkan dari Kalimantan. Setiap tiang beratnya 2 ton, dengan lingkaran 1,45 m. Garis tengah 0,45 m dengan tinggi dari tanah ke loteng 8,10 m. bangunan ini mempunyai ukuran panjang 42,20 m, dan lebar 21 m, dan tinggi bubungan 15 m. Daya tarik utama adalah terletak pada keindahan bangunan utama Saoraja yang unik dan didukung pemandangan danau yang indah serta tempat arena bermain bagi para pengunjung.

Akses menuju kawasan ini sangat mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan pribadi /umum/sewa berupa mobil, motor dan bentor dengan kondisi jalan beraspal. Di dalam kawasan, jalannya juga sudah sangat baik dan beraspal.

4.1.3 Kawasan Agro Wisata Sutera

Daun murbei (*Moms sp*), merupakan pakan Ulat sutera (*Bombyx moril L*) yang menghasilkan kokon untuk diolah menjadi benang sutera, selanjutnya memulai proses pemintalan menjadi



kain sutera. Tahap penanaman murbei hingga proses pembuatan kain sudah sejak dahulu menjadi proses pembuatan kain sutera sudah sejak dahulu menjadi obyek yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Wajo.

Lokasi penanaman Murbei terletak di Kecamatan Sabbangparu sekitar 10 km dari Kota Sengkang. Di tempat ini wisatawan dapat menyaksikan proses penanaman Murbei, pemeliharaan ulat sutera, proses pemintalan benang sutera, sampai pertenunan menjadi kain sutera. Sedangkan sentra pembuatan sarung dan kain sutera terdapat di Kecamatan Tanasitolo sekitar 3 km dari Kota Sengkang.

4.1.4 Kawasan Wisata Alam Kalola



Kawasan wisata bendungan Kalola terletak di Desa Sugi Kecamatan Maniangepajo sekitar 35km dari Kota Sengkang. Bendungan Kalola memiliki genangan air 21,5km dengan debit air 900 m³/detik membentang di sepanjang pegunungan yang ditumbuhi pepohonan yang rindang sejuk, dan menyenangkan. Di samping dapat menyaksikan aktifitas nelayan menangkap ikan, kawasan ini juga sangat baik sebagai tempat perkemahan dan penyaluran hobi renang karena di sekitar tempat ini terdapat tempat fasilitas kolam renang.

4.1.5 Goa Nippon



Goa Nippon terletak di Kecamatan Tempe, sekitar 3 km dari Kota Sengkang. Lokasinya di pegunungan sebelah timur kota dan tidak jauh dari Masjid Raya Sengkang. Pengunjung dapat berjalan kaki menuju lokasi ini terutama bagi mereka juga suka berpetualang.

Goa Nippon Berupa terowongan dengan mulut goa yang mempunyai garis tengah sekitar satu meter. Goa ini dibuat oleh tentara jepang sebagai tempat persembunyian dan pertahanan saat perang dunia kedua. Jumlahnya sekitar tujuh goa, ada yang berbentuk huruf U dan huruf I. saat ini sebagian goa sudah tertutup tanah secara alami. Masyarakat meyakini masih banyak terdapat harta karun peninggalan jepang di dalamnya.

Fasilitas wisata yang tersedia berupa lampu penerangan dan pintu jeruji besi. Pengunjung dapat menikmati keindahan goa ini sebagai sebuah maha karya sejarah dan dapat berjalan dari mulut gua dari pintu masuk sampai pintu keluar.

4.1.6 Air Terjun Awo



Air Terjun Awo terletak di Kecamatan Keera, sekitar 65 km dari Kota Sengkang, Air terjun ini berada di dekat salah satu dusun yang masyarakatnya masih memiliki pola hidup yang tergantung pada alam sekitar dan perkebunan. Air terjun Awo terletak pada keindahan alam pengunungan. Luncuran air terjun yang tingginya tiga atau empat tingkatan. Jalan menuju air terjun berupa setapak dan sekelilingnya merupakan hutan yang masih asli dan dilindungi oleh masyarakat. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

4.1.7 Pantai Bangsale'e



Pantai Bangsale'e terletak di Kecamatan Pitumpanua, sekitar tujuh puluh lima kilo meter dari Kota Sengkang. Kawasan ini berupa Daerah pantai yang berpasir. Kawasan ini hanya pelabuhan penyebrangan Kapal Fery. Masyarakat setempat menjadikannya pusat rekreasi pantai karena lokasinya dekat dengan Kota Siwa. Pantai Bangsal'e ini memiliki pemandangan laut yang indah, air laut yang bersih dan jernih, pelabuhan penyebrangan kapal fery dan kawasan yang dijadikan tempat pelelangan ikan. Ini sangat menarik bagi wisatawan yang ingin mendapatkan suasana pesisir. Akses menuju kawasan ini berupa jalan beraspal. Tempat ini mudah dijangkau dari Kota Siwa.

4.1.8 Pantai Lawara

Pantai Lawara terletak di Kecamatan Keera, sekitar 60 Km dari Kota Sengkang. Pantai Lawara merupakan kawasan Hutan Bakau/Mangrove. Pada saat air laut surut, garis pantai berupa pasir sekitar satu kilo meter muncul selama kurang dua jam. Selain itu masyarakat setempat menyakini terdapat keindahan bawah laut koral pada jarak kurang lebih tiga kilo mil garis pantai.

Jalan menuju kawasan pantai lawara sebagian beraspal dan sebagian berupa pengerasan. Dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat menunjukan kawasan pantai lawara.

4.1.9 Situs Tosora



Situs Tosora terletak di Kecamatan Majauleng Desa Tosora, Sekitar 20 km dari Kota Sengkang. Tosora adalah bekas ibu kota Kabupaten Wajo sekitar abad ke-17. Situs ini dikelilingi oleh delapan buah danau kecil. Terdapat peninggalan sejarah seperti makam raja-raja Wajo, dan bekas gedung amunisi (geddong), dan mesjid kuno yang dibangun tahun 1621, makam yang bernisan meriam sumur bung perani tempat memandikan prajurit-prajurit tempo dulu sebelum terjun ke medan.

Situs Tosora memiliki keunikan bangunan mesjid kuno dan gudang amunisi yang terbuat dari bebatuan yang direkatkan dengan menggunakan putih telur. Pemandangan disekitar situs juga sangat indah. Tempat ini sering menjadi tempat siara dan menikmati pemandangan alam sambil mengetahui sejarah Wajo.

Jalan menuju situs Tosora cukup baik dengan jalan aspal. Daerah ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan umum atau pribadi, kendaraan umum atau kendaraan sewa seperti motor dan mobil.

4.1.10 Situs Makam Puang Massora



Situs makam Puang Massora terletak di Kecamatan Maniangpajo, Desa Sogi, sekitar 33km dari Kota Sengkang menuju kawasan Bendungan Kalola. Situs makam Puang Massora dipercaya memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan kebaikan bagi orang yang melakukan ritual. Para pengunjung, rata-rata melakukan doa dan ritual serta hajatan di Situs Makam Puang Massora. Akses menuju Situs Makam Puang Massora cukup baik dengan kondisi jalan beraspal.

4.1.11. Situs Istana Datunna Cina



Situs Istana Datunna Cina terletak di Kecamatan Pammana sekitar 30km dari Kota Sengkang. Kawasan ini berada diatas bukit tertinggi di Kecamatan Pammana. Disekitar situs terdapat perkebunan jagung. Kawasan ini awalnya bekas kompleks istana yang dipercaya dapat memberikan kebaikan atau keberkahan. Jalan menuju situs dari Kota Sengkang cukup baik berupa jalan beraspal dan hanya sebagian berupa jalan pengerasan. Lokasi ini dapat diakses menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat.

4.1.12 Jenis-Jenis Kesenian

a. Sikkiri Rebbana

Kesenian ini terdapat di Kecamatan Belawa. Dalam kesenian ini dilantunkan syair bersanji yang diiringi dengan irama rebana tradisional. Ini adalah wujud perpaduan nilai agama dan nilai budaya yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia akhirat.

b. Sore Lolusa (Sere Bissu)

Tarian ini terdapat di Kecamatan Pammana. Para penari dipimpin oleh seorang bissu dengan menggunakan bahasa bugis kuno atau bahasa dari langit dengan maksud memohon doa restu kepada dewata.

c. Pelantikan Datu

Proses pelantikan datu terdapat di Kecamatan Pammana. Proses ini sejak jaman Datu Pammana Wetenri Lallo. Saat itu raja dibacakan sumpah (Watampanua Aliwang Tellu) oleh ketua adat (Matowa to Pannennungi) yang isinya berkisar kepada tanggung jawab raja terhadap rakyatnya dan sebaliknya pula rakyat terhadap rajanya. Peranan angkuru/bissu memeriahkan acara ini cukup besar sebagai perangkat ritual acara-acara kerajaan.

d. Mallawa Boting

Mallawa Boting adalah prosesi pernikahan anak perempuan raja. Prosesi ini terdapat di Kecamatan Pammana yang dilaksanakan di gerbang kota atau pada alur jalan menuju rumah pengantin perempuan. Kedua belah pihak diarak dengan menggunakan pasukan berkuda lengkap dengan persenjataan tradisional. Mereka bertemu di tempat itu dan terjadilah penghadangan pasukan pengantin laki-laki dengan pasukan pengantin perempuan. Setelah terjadi adu kekuatan barulah pasukan pengantin laki-laki dipersilahkan masuk dan sampai di rumah (saoraja) untuk melangsungkan pernikahan. Kegiatan ini menggambarkan bahwa ketelitian dan kewibawaan raja

serta juga menyatakan makna bahwa tidak mudah mempersunting putri raja.

e. Mappitu-Pitu

Mappitu-Pitu adalah salah satu alat musik yang terdapat di Kecamatan Pammana. Alat musik ini terbuat dari bilah rotan yang dipasang pada bagian atas layang-layang (merak). Ketika diterpa angin akan menimbulkan irama yang indah. Kegiatan ini dilaksanakan biasanya pada pesta-pesta panen sebagai bagian dari acara syukuran bagi para petani termasuk kegiatan mallogi dan massempé.

f. Sere Pajaga

Tarian Sere Pajaga terdapat di Kecamatan Tempe dan Kecamatan Pammana. Tarian ini merupakan suatu rangkaian penjemputan tamu secara adat setelah tamu berada dalam ruangan. Tarian ini lahir di istana dan dibawakan oleh keluarga istana yang berfungsi sebagai hiburan. Tarian ini menggunakan kipas yang bermakna semoga tamu yang dijemput bersama rombongan berada dalam suasana kesejukan.

g. Musik Tradisional Se Adat Tempe

Kesenian ini terdapat di Kecamatan Tempe. Sebagai tanda pernyataan kegembiraan atas berlangsungnya suatu acara diadakanlah hiburan musik tradisional yang digemari oleh masyarakat karena menyaksikan musik tempo dulu.

h. Padendang

Kesenian ini terdapat di semua kecamatan. Atraksi ini menggambarkan luapan kegembiraan masyarakat menyambut pesta perkawinan. Padendang

menggunakan alat lesung dan alu yang bermakna kesuburan dan kemakmuran. Alu dan lesung adalah sebuah alat untuk mengolah padi menjadi beras atau dapat disebut pabrik beras tempo dulu.

i. Kecapi Suling

Alat musik ini terdapat di Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Sabbangaru. Kecapi dan suling adalah suatu kesenian tradisional yang juga menampilkan lagu-lagu daerah, baik lagu tempo dulu maupun lagu modern (lagu-lagu daerah bugis). Pemain suling 2-3 orang.

j. Massure (Membaca Syair atau cerita)

Kesenian ini terdapat di Kecamatan Tempe, Kecamatan Maniangpajo, Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Pammana. Massure berkisah tentang perjalanan awal lahirnya manusia di dunia yang dikenal dalam Sure' I Lagaligo. Acara ini mengisi suatu hajatan yang fungsinya disamping sebagai hiburan juga sebagai pemahaman nuansa sejarah peradaban manusia.

k. Maccera Tappareng

Upacara ritual yang dilaksanakan pada tiap tahun ini dipimpin oleh penghulu nelayan yang disebut Matoa Pakkaja. Acara ini disebut Maccera Tappareng yang berarti mengeluarkan darah (memotong hewan dalam hal ini kerbau). Kepala kerbau yang dipakai sebagai persembahan diletakkan diruang tengah rumah Matoa Pakkaja dibalut dengan kain merah dan tanduknya dibungkus serta dikelilingi sesajen.

l. Maddoja Bine, merupakan suatu tradisi masyarakat petani berjaga di malam hari menunggu benih padi

yang diperam, sebelum ditabur dipersemaian keesokan harinya. Ritual ini dilakukan sejak nenek moyang dahulu dan dilakukan secara turun temurun sampai sekarang. Maddoja Bine merupakan salah satu tradisi yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Sanging Serri (dewi padi) sebagai wujud penjelmaan manusia.

Masyarakat terdahulu melakukan ritual ini secara rutin sebelum menanam di sawah, agar padi tumbuh subur dan kelak hasil panen melimpah dan berhasil. Pada ritual ini, masyarakat berbondong-bondong membawa ragam makanan dan kue tradisional serta hasil bumi sebagai sajian dalam ritual tersebut. Adapula ritual lainnya yang mengiringi ritual Maddoja Bine diantaranya Mappadendang dan Massure'.

- m. Ana Masyari merupakan tradisi yang menampilkan suatu kelompok kesenian pada zaman dahulu yang karena adanya pengaruh perkembangan agama Islam sehingga dipentaskan oleh laki-laki berpenampilan menyerupai wanita. Kelompok ini menampilkan lagu dan tarian yang diiringi dengan musik tradisional. Tradisi ini merupakan sarana hiburan yang ditampilkan pada saat setelah panen selesai, pada pesta pernikahan maupun perhelatan lainnya.

4.1.13 Makanan Tradisional

a. Lawa Urang



Bahan-bahan terdiri dari: pisang batu muda, udang, kelapa goreng, santan kelapa (kental), jeruk nipis, garam dan vetsin.

b. Lawa Bale (Ikan)



Bahan-bahan terdiri dari: ikan, kelapa goreng dan jeruk.

c. Pasere Bale (Ikan Bakar)



Bahan-bahan terdiri dari: belimbing sayur, kemiri dan lombok.

d. Sambala Urang



Bahan-bahan terdiri dari; udang (urang), lombok besar, merica, bawang merah, bawang putih dan kelapa.

e. Tafa Bale (Ikan Asap)



Bahan-bahan terdiri dari: ikan besar (Bale Loppo) - Ikan dibakar asap sampai matang.

f. Bajabu Bale



Bahan-bahan terdiri dari: ikan (dikukus/diasap), santan kelapa, garam, bawang merah dan bawang putih.

g. Barobbo



Bahan-bahan terdiri dari: jagung, sayur, udang, bawang merah, bawang putih, garam, merica dan masako.

h. Rojjo



Bahan-bahan terdiri dari: ubi kayu, mie, bawang putih, bawang merah, merica, garam dan vetsin.

i. Nasu Lekku



Bahan-bahan terdiri dari: ayam, lengkuas, santan kelapa, kelapa goreng, serai, bawang merah, bawang putih, kunyit, merica dan garam

4.2 Fasilitas Pariwisata

Fasilitas pariwisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran, dan toko cinderamata),

4.3 Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

Fasilitas umum seperti mushola, tempat parkir, WC dan shetler perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan dan pemeliharannya. Secara umum fasilitas

umum untuk daya tarik wisata di Kabupaten Wajo masih perlu pembenahan dalam memenuhi standar yang telah ditentukan.

4.4 Aksesibilitas Pendukung Pariwisata

Secara umum akses transportasi (jalan alternatif, aspal, hotmik dan jalan setapak) di Kabupaten Wajo layak dan dapat dilalui kendaraan angkutan pribadi, umum (roda dua dan empat).

4.5 Prasarana Umum Pendukung Pariwisata

Prasarana adalah semua hasil kontruksi fisik, baik yang ada di atas maupun di bawah tanah, diperlukan sebagai prasyarat untuk pembangunan, diantaranya dapat berupa pembangkit tenaga listrik, fasilitas kesehatan, dan pelabuhan. Sarana (*suprastucture*) adalah segala sesuatu yang dibangun dengan memanfaatkan prasarana.

Sarana tersebut merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan. Apabila tersedia dengan baik, para wisatawan akan merasa nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas lainnya. Sunaryo (2013:138), mengemukakan definisi sarana prasarana sebagai partisipasi masyarakat sebagai berikut :

- Prasarana kepariwisataan (*tourism infrastructures*) adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beranekaragam.
- Prasarana umum: jalan, air bersih, terminal, lapangan udara, komunikasi dan listrik.
- Prasarana yang menyangkut ketertiban dan keamanan agar kebutuhan terpenuhi dengan baik seperti apotik, kantor pos, bank, rumah sakit, polisi, dan lain-lain.

- Sarana kepariwisataan (tourism superstructure) adalah perusahaan-perusahaan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangan wisatawan, baik secara langsung atau tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung pada kedatangannya wisatawan. Sarana kepariwisataan dapat berupa :
 - Sarana pokok. Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada arus kedatangan wisatawan. Termasuk didalamnya travel agen, transportasi, akomodasi, dan restoran.
 - Sarana pelengkap. Sarana pelengkap kepariwisataan adalah perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan, tetapi yang terpenting adalah untuk membuat agar wisatawan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata.
 - Sarana-Sarana penunjang kepariwisataan adalah perusahaan adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok serta berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi fungsi lebih penting adalah agar wisatawan lebih banyak mengeluarkan atau membelanjakan uangnya di tempat yang dikunjunginya.
 - Prasarana Perekonomian (Economic Infrastructure), yang dapat dibagi atas:
 - ✚ Pengangkutan (transportation)
 - ✚ Prasarana komunikasi

- ✚ Kelompok yang termasuk dalam “utilities”
- ✚ Sistem perbankan
- Prasarana Sosial
 - ✚ Sistem pendidikan
 - ✚ Pelayanan kesehatan
 - ✚ Faktor keamanan
 - ✚ Petugas yang langsung melayani wisatawan (*government apparatus*).

Berdasarkan pembagian sarana dan prasarana tersebut dapat disimpulkan bahwa prasarana dibagi atas dua yaitu prasarana perekonomian dan prasarana sosial. Prasarana sosial menyangkut didalamnya alat transportasi yang digunakan untuk mencapai kawasan objek wisata, prasarana komunikasi untuk mengetahui keberadaan kawasan objek wisata. Sedangkan prasarana sosial diantaranya mencakup sistem pendidikan yang dapat menentukan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan yang diberikan kepada wisatawan, faktor keamanan yang dapat membuat wisatawan merasa aman berada di objek wisata dan pelayanan yang diberikan oleh petugas secara langsung

4.6 Penduduk Sebagai Potensi Sumber Daya Manusia Pariwisata

Berdasarkan data BPS 2020 dalam Kabupaten Wajo dalam angka, jumlah penduduk Kabupaten Wajo sebanyak 397.814 jiwa dengan angka kepadatan penduduk Kabupaten Wajo sebesar 159, artinya secara rata-rata tiap kilometer persegi wilayah di Kabupaten Wajo didiami oleh 159 penduduk. Rasio jenis kelamin Kabupaten Wajo sebesar 92,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Persentase jumlah penduduk menurut kecamatan terbesar pada Kecamatan Tempe dengan 17%, disusul oleh Kecamatan Pitumpanua dengan 11%, Kecamatan Tanasitolo dengan 10%, Kecamatan Majauleng dan Kecamatan Belawa masing-masing dengan 8%, Kecamatan Sabbangparu dan Kecamatan Keera masing-masing dengan 6%, Kecamatan Bola, Kecamatan Takkalalla dan Kecamatan Sajoanging masing-masing dengan 5%, Kecamatan Maniangpajo dan Kecamatan Penrang dengan 4% dan terakhir Kecamatan Gilireng dengan 3%.

Untuk mendukung terwujudnya pembangunan kepariwisataan diperlukan dukungan SDM dari penduduk yang bermukim/berdomisili di area/kawasan wisata. Sumber daya manusia yang diperlukan dalam bidang pariwisata setidaknya memiliki 3 hal pokok yaitu mengetahui cara menjual, mengetahui apa yang bisa dijual dan dapat mempertahankan yang dijual dalam waktu jangka panjang.

Dalam mendukung kemampuan "mengetahui cara menjual", maka pengembangan SDM pariwisata harus dibarengi dengan pengetahuan tentang konsep-konsep pemasaran, kemampuan aplikasi konsep baur pemasaran (*marketing mix*) yang menyangkut kebijakan tentang harga, kualitas produk yang dijual dan konsep promosinya.

Di daerah dimana pariwisata sudah berkembang dengan pesat seperti Bali, Yogyakarta dan lain-lainnya, maka pramuniaga (guides), biro-biro perjalanan (travel biro), hotel-hotel dan restoran-restoran yang bertaraf internasional. Merekalah yang mampu melaksanakan paket-paket wisata, mendatangkan suatu grup wisatawan bekerjasama dengan mitranya di luar negeri.

Pada aspek "mengetahui apa yang dijual" maka keahlian di bidang-bidang tertentu seperti eco-tourism, marine eco-tourism,

cultural tourism, agro tourism dan sebagainya merupakan hal yang perlu dimiliki SDM Pariwisata. Dalam jangka pendek, keahlian khusus seperti ini dapat diperoleh melalui kerjasama dengan universitas- universitas, lembaga pendidikan dan penelitian lainnya.

Untuk dapat "mempertahankan apa yang mau dijual" itu dalam jangka panjang maka SDM harus dikembangkan agar memiliki kemampuan konsep perencanaan yang mampu mewujudkan usaha pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dengan memanfaatkan lingkungan berbagai bidang keilmuan seperti ahli biologi, teknik lingkungan, kimia lingkungan, ekonomi lingkungan, dan hukum.

Rencana pengembangan diprioritaskan pada:

- Menyiapkan tenaga-tenaga terampil di bidang pariwisata
- Meningkatkan kemampuan berbahasa asing di kalangan stakeholder yang bergerak di bidang pariwisata
- Meningkatkan kemampuan teknis di bidang manajemen kepariwisataan
- Meningkatkan kemampuan di bidang perencanaan dan pemasaran pariwisata
- Membuat pusat-pusat pendidikan dan pelatihan bidang kepariwisataan
- Membuka jurusan pariwisata dan perhotelan

Kemajuan industri pariwisata harus ditunjang oleh keahlian khusus di bisnis perhotelan (*room services, food dan beverage, bartender etc*) di bisnis restoran, biro perjalanan, pemandu wisata dan banyak lagi keahlian lainnya. Disamping penguasaan teknis seperti itu, SDM bidang ini harus menguasai bahasa asing sesuai keragaman wisatawan mancanegara.

Di daerah yang usaha pariwisatanya sudah maju, kebutuhan SDM seperti ini dengan mudah dapat diperoleh dari lulusan sekolah kepariwisataan baik di tingkat D1, D3, bahkan di tingkat SL Kebutuhan SDM di bidang perhotelan di Negara maju untuk hotel berbintang rasionya adalah 3 orang/kamar.

Pada tingkat pemerintah pengembangan SDM seharusnya pada usaha penciptaan tenaga perencana yang mampu mengkoordinasi secara komprehensif semua rencana-rencana dari dinas yang terkait dan inspirasi dari semua unsur industri pariwisata yang ada, melalui ketersediaan jaringan transportasi dan komunikasi yang baik.

Kemajuan industri pariwisata daerah sangat ditentukan oleh penanaman investasi dibidang ini. Oleh karena itu tugas Pemerintah Daerah adalah menjadikan daerahnya indah sehingga banyak investor yang tertarik. Dan itu baru terjadi apabila tersedia prasarana dan sarana yang memadai, keamanan terjamin, kebersihan lingkungan baik dan sebagainya sehingga ada kesempatan pengusaha memperoleh keuntungan yang memadai.

Dalam jangka pendek pengembangan SDM yang mampu merencanakan operalisasi event-event budaya secara regular, pertemuan/seminar seni budaya, komunikasi budaya dengan mewujudkan sebuah gedung kesenian/budaya. Dalam usaha ini harus pula dihindari terjadinya komersialisasi budaya yang berdampak negative baik bagi perkembangan kebudayaan itu sendiri maupun pada industri pariwisata daerah dalam jangka panjang.

Prioritas pengembangan adalah:

- Meningkatkan kemampuan teknis aparat pemerintah di bidang manajemen kepariwisataan

- Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dibidang perencanaan dan pemasaran pariwisata.
- Meningkatkan kualitas SDM aparat pemerintah melalui lembaga pendidikan pariwisata.
- Meningkatkan sistem perekrutan yang memiliki kualifikasi pendidikan pariwisata

BAB 5

INDUSTRI PARIWISATA



5.1 Usaha Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan berkaitan erat dengan aspek Industri dan investasi dalam pariwisata. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Ditilik dari pertumbuhan industri pariwisata langsung (hotel, rumah makan dan industri penunjang wisata); industri tumbuh dengan cepat. Investor memerlukan kepastian berusaha atau mendapat keuntungan, maka kondisi-kondisi yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan melakukan investasi antara lain:

- a. Tren pertumbuhan (positif dan stabil, tidak fluktuatif)
- b. Stabilitas kawasan (tidak ada konflik sosial, konflik lingkungan, dan sebagainya)
- c. Peraturan pendukung (termasuk tidak ada peraturan yang tumpang tindih)

- d. Penegakan peraturan dan kepastian hukum Jika kondisi-kondisi ini terpenuhi, maka kondisi pertimbangan sekunder adalah:
- e. Infrastruktur dan fasilitas pendukung
- f. Sumber daya manusia

Insentif Faktor a-d akan menentukan masuk-tidaknya investasi, sementara faktor e-f akan menentukan daya saing industri pariwisata terhadap destinasi wisata lain yang menjadi pesaing. Faktor primer akan menentukan masuk atau tidaknya investasi, sementara faktor sekunder akan menentukan daya saing industri pariwisata terhadap daerah tujuan wisata lain yang menjadi pesaing sehingga hal ini harus dilakukan untuk mengembangkan Kabupaten Wajo sehingga arahan dan strategi pengembangan industri dan investasi pariwisata Kabupaten Wajo dapat dilaksanakan dan berkembang dengan positif dan stabil.

Pariwisata memberikan peluang kepada masyarakat untuk berusaha atau berwirausaha, jenis-jenis usaha yang ada kaitannya dengan pariwisata tergantung dari kreativitas para pengusaha swasta baik yang bermodal kecil maupun besar untuk memberikan jasa atau menawarkan produk yang sekiranya diperlukan oleh wisatawan. Usaha pariwisata secara menyeluruh dapat dikatakan sebagai industri pariwisata, tetapi tidak diibaratkan sebagai pabrik yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi, serta ada produknya. Industri pariwisata adalah keseluruhan usaha-usaha yang dapat dinikmati wisatawan semenjak awal mula proses ketertarikan untuk berwisata, menikmati lokasi daerah tujuan wisata sampai pada proses akhir wisatawan tersebut pulang menginjakkan kakinya sampai di rumah, kemudian mengenangnya.

Bentuk usaha pariwisata ini, dalam pengelolaannya dapat dilakukan bentuk kerjasama antara pihak pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat itu sendiri sehingga atmosfer dan dampak pariwisata dapat dirasakan langsung terhadap kesejahteraan semua stakeholders terkait. Damardjati (1992) dalam Karyono (1997) mendefinisikan industri pariwisata sebagai rangkuman dari berbagai macam bidang usaha, yang secara bersama-sama menghasilkan produk-produk maupun jasa-jasa/layanan-layanan atau services, yang nantinya baik secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan selama perawatannya.

Usaha-usaha pariwisata, dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan besar, sebagai berikut, yaitu :

- a. Transportasi, misalnya dengan menggunakan kapal, mobil, bus, dan lain-lain.
- b. Akomodasi dan Perusahaan Pangan
 - 1) Jenis akomodasi: hotel, pondok, perkemahan, pusat peristirahatan, dan sebagainya.
 - 2) Jenis perusahaan pangan: restoran, rumah makan, cafe, warung dan sebagainya.
- c. Perusahaan Jasa Khusus, dapat berupa biro perjalanan, agen perjalanan, pelayanan wisata, pramuwisata, pelayanan angkutan barang atau porter, perusahaan hiburan dan lain sebagainya
- d. Penyediaan Barang, yang dimaksud barang adalah sesuatu benda ataupun hasil bumi yang dapat ditawarkan atau dijual kepada wisatawan yang mempunyai keterkaitan dengan lokasi daerah tujuan wisata. Barang tersebut dapat berupa souvenir,

kerajinan tangan, patung seni dari kayu dan batu, papan selancar, buah-buahan dan sebagainya.

5.2 Usaha Kecil dan Menengah Pendukung Pariwisata Kabupaten Wajo

Dalam pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata dibutuhkan penciptaan strategi yang baik. Strategi diciptakan untuk membantu menarik pelaku usaha dalam hal ini masyarakat sehingga dapat menularkan pemahaman pelayanan yang baik melalui strategi *learning by doing* dimana masyarakat belajar langsung dari pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga proses penciptaan ide kreatif atau rekayasa produk dapat dengan mudah dilakukan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan memberikan dukungan sehingga dengan mudah mempercepat proses pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Peningkatan sumber daya manusia pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bisnis pariwisata, standar pelayanan wisata serta hubungan yang kuat antara pariwisata dengan usaha pelestarian budaya dan alam sebagai aset pariwisata itu sendiri. Peningkatan pemahaman masyarakat akan peluang bisnis industri pariwisata skala kecil dan menengah yang dapat menunjang pariwisata di daerahnya. Strategi ini tentu saja memerlukan perhatian yang besar oleh pemerintah, karena strategi ini dapat mempercepat peningkatan pelibatan masyarakat dan sekaligus mengurangi potensi konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha (pemodal nasional maupun asing).

Pola-pola kemitraan dapat diterapkan pemerintah dengan memberlakukan aturan bagi para pemodal untuk mengasuh atau

membina usaha kecil dan menengah yang ada disekitar mereka melakukan investasi. Pemerintah dalam hal ini sebagai mediator yang akan memfasilitasi peningkatan jejaring di antara pengusaha pariwisata dengan usaha kecil dan menengah di tingkat masyarakat.

Untuk mendukung dilakukannya pola kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat maka usaha penguatan implementasi perlu dilakukan oleh keterlibatan dan pemahaman posisi masing-masing pihak. Dukungan usaha kepada masyarakat dapat diberikan dari Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat melalui beberapa kementerian, misalnya Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM Dan Koperasi, dan sebagainya. Selain itu, strategi ini ditujukan juga kepada pemerintah guna memberikan penguatan implementasi penguatan keterlibatan masyarakat dengan menarik dukungan dari pihak lain, baik berupa LSM nasional maupun internasional. Oleh karena itu, perencanaan skema atau mekanisme penguatan pola kemitraan ini harus diperjelas sehingga masyarakat akan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi peluang usaha yang ada. Pembentukan regulasi-regulasi oleh pemerintah sebagai fasilitator diperlukan untuk menguatkan posisi masyarakat dalam pola kemitraan tersebut juga diperlukan sehingga sosialisasi secara berkelanjutan terhadap pola kemitraan harus selalu dikembangkan. Strategi ini juga diperlukan agar pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat dapat menggunakan teknologi terbaru dan berkembang dengan permodalan oleh pihak swasta.

1. Restoran/Rumah Makan

Tabel 5.1
DATA RESTORAN/RUMAH MAKAN DI KABUPATEN WAJO
TAHUN 2019

NO.	NAMA RESTORAN / RUMAH MAKAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
1	CAFE RUMAH TUA	JL. A.P. PETTARANI	TEMPE	
2	LESEHAN JETPUR	JL. BANGAU	TEMPE	
3	TIME OUT CAFE N RESTO	JL. SUNGAI WALENNAE	TEMPE	
4	TERRACE BBC	JL. A. PALLAWARUKKA	TEMPE	
5	FANTASTIC CAFE	JL. WR. SUPRATMAN	TEMPE	
6	RM GLORY	JL. A. TANJONG SENGKANG	TEMPE	
7	AMIRA RESTOURANT	JL. A. MALINGKAAN	TEMPE	
8	CAFE N RESTO 4R	JL. BAU MAHMUD	TEMPE	
9	D'MAMA	JL. A. MAGGA AMIRULLAH	TEMPE	
10	BALE-BALE RESTO	JL. A. MAGGA AMIRULLAH	TEMPE	
11	CAFE LAMPULUNG	JL. POROS RUMAH ADAT ATAKKAE	TEMPE	
12	CAFE MATTIRO TAPPARENG	JL. BAU MAHMUD	TEMPE	
13	THE LOUNGE GARDEN	JL. PAHLAWAN	TEMPE	
14	WARUNG BOLA DUNIA	JL. CENDANA NO.1 SENGKANG	TEMPE	
15	STRECH MANIA	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SKG	TEMPE	
16	OERIP ASIH	JL. A. JAJA NO.2	PITUMPANUA	
17	LAPEH SALERO	JL. MESJID RAYA NO.58 SKG	TEMPE	
18	BAKSO PAHLAWAN	JL. PAHLAWAN NO.5 SENGKANG	TEMPE	
19	RM. BOLA DUNIA	JL. JAWA SENGKANG	TEMPE	
20	WARUNG COTO MAKASSAR	JL. VETERAN NO.39 SENGKANG	TEMPE	
21	OERIP ASIH 2	DESA BATU	PITUMPANUA	
22	RM. SARI LAUT DUTA	BOLABAKKA KEL.BULETE	PITUMPANUA	
23	BRAVO	JL. LATENRI LAI TOSENGENG SKG	TEMPE	

NO.	NAMA RESTORAN / RUMAH MAKAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
24	WARUNG MAKAN SUMPULOLO	JL. KARTIKA CHANDRA KIRANA	TEMPE	
25	WARUNG COTO MAKASSAR	JL. JEND. SUDIRMAN SENGKANG	TEMPE	
26	COTO MAKASSAR	JL. RA. KARTINI SENGKANG	TEMPE	
27	SURYA	JL. SAWERIGADING NO.72 SKG	TEMPE	
28	RUMAH MAKAN HARYATI	KEC. KEERA	KEERA	
29	RUMAH MAKAN MINANGGASADAE I	SIWA	PITUMPANUA	
30	WARUNG MIE PANGSIT MAS BRO	JL.WR MANGOSIDI NO.15 SKG	TEMPE	
31	WARUNG BANG KUMIS	JL.WR MANGOSIDI SENGKANG	TEMPE	
32	WARUNG MARAN LAMPU MERAH	JL.WR MANGOSIDI SENGKANG	TEMPE	
33	WARUNG MAKAN INDO LOGO	JL. WR MANGOSIDI	TEMPE	
34	RM PADANG RAYA	JL. MASJID RAYA	TEMPE	
35	WARUNG PANGKEP	JL.PUANGRIMAGALATUNG	TEMPE	
36	WARUNG MAKAN SUMBER REJEKI	JL. JEND SUDIRMAN SENGKANG	TEMPE	
37	SARI LAUT	JL. JEND SUDIRMAN SENGKANG	TEMPE	
38	RM MAS EKO	JL. JEND SUDIRMAN SENGKANG	TEMPE	
39	WARUNG SURABAYA	JL.PUANGRIMAGALATUNG	TEMPE	
40	RM NANDA	JL. K. H. A SYARIF MR	TEMPE	
41	WARUNG NASI GORENG 24 JAM	JL. JEND SUDIRMAN SENGKANG	TEMPE	
42	WARUNG COTO	JL. LASANGKURU	TEMPE	
43	WARUNG SOP SAUDARA	JL. LATENRI LAI TOSENGENG SKG	TEMPE	
44	WARUNG MAKAN KENCANA	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SKG	TEMPE	
45	WARUNG MAKAN MEKAR SARI	JL.KALIMANTAN	TEMPE	
46	WARUNG MAKAN MEKAR SARI	JL. PAHLAWAN	TEMPE	
47	WARUNG SUKOWATI	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SENGKANG	TEMPE	
48	WARUNG MAKAN BAKSO JUMBO	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SENGKANG	TEMPE	
49	WARUNG MAKAN BARU MUNCUL	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SENGKANG	TEMPE	

NO.	NAMA RESTORAN / RUMAH MAKAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
50	RM ARE - LA	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SENGKANG	TEMPE	
51	RM D'MAMA	JL. A. MAGGA AMIRULLAH SENGKANG	TEMPE	
52	RM BAKSO ARAB	JL. H. A NINNONG SENGKANG	TEMPE	
53	WARUNG GOYANG LIDAH	JL. RA. KARTINI SENGKANG	TEMPE	
54	SOP SAUDARA	JL. RA. KARTINI SENGKANG	TEMPE	
55	RM SETIA KAWAN	JL. RA KARTINI SENGKANG	TEMPE	
56	RM FUJI	JL. VETERAN	TEMPE	
57	WARUNG SIDU MULYO	JL. A. MACCA AMIRULLAH	TEMPE	
58	WARUNG BAROKAH	JL. A. MACCA AMIRULLAH	TEMPE	
59	RM. MARIO SUDUT	JL. DATUK SULAIMAN	TEMPE	
60	RM AROMA 108	JL. A. ODDANG	TEMPE	
61	RM TOMODY	JL. A. ODDANG	TEMPE	
62	RM ANGA	JL. SOLO	BOLA	
63	WARUNG KITA	KEL PENEKI	SAJOANGING	
64	KUB TERKINI	DESA AKKOTONGENG	SAJOANGING	
65	WARUNG MAKAN PRASMANAN	JL. A. MACCA AMIRULLAH	TEMPE	
66	RM. MINANGSADAE II	SIWA	PITUMPANUA	
67	SABAR MENANTI	JL. BAU BAHARUDDIN	TEMPE	
68	WARUNG RONGGOLAWA	JL. BAU BAHARUDDIN	TEMPE	
69	WARUNG BAKSO SARI ROSO	JL. SULAWESI NO.24	TEMPE	
70	RM JIMMI	JL. PUANGRIMAGALATUNG	TEMPE	
71	WARUNG COTO MINASA UPA	JL. KEJAKSAAN NO 2 SENGKANG	TEMPE	
72	RM SOP SAUDARA	SIWA	PITUMPANUA	
73	RM COTO MAKASSAR	SIWA	PITUMPANUA	
74	RUMAH MAKAN	KEERA	KEERA	
75	SEDERHANA	DESA INRELLO	KEERA	
76	RM NASYWAN	KEERA	KEERA	
77	RM PUTRI TUNGGAL	KEL. BALLERA	KEERA	

NO.	NAMA RESTORAN / RUMAH MAKAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
78	RM JUKU EJA	KEL. BULETE	PITUMPANUA	
79	WARUNG COTO MAKASSAR	BELAWA	BELAWA	
80	WARUNG SUMBER REJEKI	TERUMPAKKAE	MAJAULENG	
81	WARUNG COTO MAKASSAR	TERUMPAKKAE	MAJAULENG	
82	RM. ANDA	KEERA	KEERA	
83	WARUNG SOP SAUDARA	ATAPANGE	MAJAULENG	
84	WARUNG SOP SAUDARA	ATAPANGE	MAJAULENG	
85	MEGA RASA	JL. A MAGGA AMIRULLAH	TEMPE	
86	BAKSO NUSANTARA	JL BAU BAHARUDDIN	TEMPE	
87	WARUNG SETIA VETERAN	JL. VETERAN NO.1	TEMPE	
88	WARUNG PANGKEP	JL. MASJID RAYA	TEMPE	
89	WARUNG RESTU IBU	JL. WR MONGOSIDI	TEMPE	
90	RM TRIANDIS	DESA BATU	PITUMPANUA	
91	WARUNG POJOK	JL. MUHAMMADIYAH	TEMPE	
92	RM. SINAR PADANG	JL. JEND. SUDIRMAN	TEMPE	
93	WARUNG PANGKEP	JL. MASJID RAYA	TEMPE	
94	RM. DAPUR RUPA	JL. PAHLAWAN	TEMPE	
95	DAPUR ITIK NNM	JL. SAWERIGADING	TEMPE	
96	PALEKKO 27	JL. BERINGIN	TEMPE	

2. Hotel/Penginapan

Tabel 5.2
DATA HOTEL / PENGINAPAN DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

NO.	NAMA HOTEL / PENGINAPAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
1	EKA HOTEL	JL. MALUKU NO.12 SENGKANG	TEMPE	
2	WISMA SAWERIGADING	JL. H.A. TANJONG NO 65 SENGKANG	TEMPE	
3	HOTEL AYU	JL. A. PAGGARU NO.18 SENGKANG	TEMPE	

NO.	NAMA HOTEL / PENGINAPAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
4	PENGINAPAN ELIDA	JL. A. JAJA NO.43 SIWA	PITUMPANUA	
5	SERMANI HOTEL	JL. BAU BAHARUDDIN SENGKANG	TEMPE	
6	WISMA 77	TOBARAKKA	PITUMPANUA	
7	PATTIROSOMPE HOUSE	JL. SAWERIGADING SENGKANG	TEMPE	
8	ANDIS	JL. MUHAMMADIYAH	TEMPE	
9	YU SKI HOMESTAY	JL. TEKUKUR SENGKANG	TEMPE	
10	SURYA	JL. SAWERIGADING SENGKANG	TEMPE	
11	PENGINAPAN ARBA'E ASHIQQA	JL. SUNGAI KALOLA NO.14	TEMPE	
12	ARRIA 77	JL. MUHAMMADIYAH	PITUMPANUA	
13	NUR GADING INDAH	JL. SAWERIGADING SENGKANG	TEMPE	
14	PRIMA HOMESTAY	JL. TEKUKUR SENGKANG	TEMPE	
15	WISMA INDO BOLA	DESA MATTIROWALIE	MANIANGPAJO	
16	HOTEL BBC	JL. NENAS NO.2 SENGKANG	TEMPE	
17	WISMA MATAHARI	JL. BAU BAHARUDDIN	TEMPE	
18	WISMA GRAND PUSFA	JL. BERINGIN SENGKANG	TEMPE	
19	WISMA SERMANI	JL. A. MORI	TEMPE	
20	WISMA HERAWATI	JL. JEND A.YANI SENGKANG	TEMPE	
21	WISMA BARUGA	JL. AMANAGAPPA SENGKANG	TEMPE	
22	WISMA LIA SANTI	JL. ANDI MACCA AMIRULLAH	TEMPE	
23	HOTEL AL SALAM I	JL. A. MALINGKAAN SENGKANG	TEMPE	
24	ASHAR HOTEL	JL. PUANGRIMAGALATUNG	TEMPE	
25	WISMA BOTTOPENNO	BOTTOPENNO	MAJAULENG	
26	AL SALAM II HOTEL	JL.EMMI ZAELAN SENGKANG	TEMPE	
27	WISMA NUGRAHA	TOBARAKKA	PITUMPANUA	
28	WISMA MUSTAJAB	JL. VETERAN NO. 27	TEMPE	
29	AMIRA GUEST HOUSE	JL. A. MALINGKAAN NO. 3	TEMPE	
30	PENGINAPAN 77	TOBARAKKA	PITUMPANUA	

NO.	NAMA HOTEL / PENGINAPAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
31	CANTIKA HOTEL	JL. MUHAMMADIYAH SIWA	PITUMPANUA	
32	WISMA MASUALLE	JL. ANGGREK	TEMPE	
33	PENGINAPAN NETRAL	JL. TOMADDUALENG	TEMPE	
34	WISMA APADA	JL. A. PARENRENGE	TEMPE	
35	WISMA ASIRA	JL. ASOKA	TEMPE	
36	MULYAWAN HOMESTAY	JL. LEMBU	TEMPE	
37	HOMESTAY PURI BINTANG	JL. WOLTER MOGINSIDI	TEMPE	
38	HOMESTAY LIA GRAND	JL. A. PAGARU	TEMPE	
39	HOMESTAY RUMAH TERAPUNG	KAWASAN DANAU TEMPE	SABBANGPARU	
40	LOSMEN SURYA	JL. SAWERIGADING SENGKANG	TEMPE	
41	PONDOK BAHARI	JL. TERATAI	TEMPE	
42	PONDOK ELISA	JL. S. BULETE	TEMPE	

3. Warung Kopi

**Tabel 5.3
DATA WARUNG KOPI DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2019**

NO.	NAMA WARUNG KOPI/ CAFE	LOKASI	KECAMATAN	KET
1	COFFE BREAK	JL.A. JAJA SIWA	PITUMPANUA	
2	WARKOP LABOLONG	JL. BERINGIN SENGKANG	TEMPE	
3	INCE CAFE	JL.LEMBU KOMP.GARDEN PERMAI	TEMPE	
4	WARKOP MAJU	JL. RA KARTINI	TEMPE	
5	WARKOP PEPE	JL. WR SUPRATMAN	TEMPE	
6	WARKOP TERMINAL	JL. STASIUN SENGKANG	TEMPE	
7	CAFE RUMAH TUA	JL. A.P PETTARANI SENGKANG	TEMPE	
8	CINNA CAFE	JL. LATENRI LAI TOSENGENG SKG	TEMPE	
9	WOODBRIN	JL. BERINGIN SENGKANG	TEMPE	
10	NACANA COFFE	JL. LEMBU	TEMPE	

NO.	NAMA WARUNG KOPI/ CAFE	LOKASI	KECAMATAN	KET
11	WARKOP 99	JL. A. PAGGARU	TEMPE	
12	WARKOP PADAIDI	JL.A. MALINGKAAN	TEMPE	
13	WARKOP BENTO	JL. BAU BAHARUDDIN	TEMPE	
14	WARKOP SEDERHANA	JL. MESJID RAYA	TEMPE	
15	LA D'WAN COFFE & CAFE	JL. S. GILIRENG	TEMPE	
16	CAFE RIA	TIMORO	TEMPE	
17	CAFE SMILE	JL. PUANGRIMAGALATUNG	TEMPE	
18	WARKOP ABANG	JL. A. MACCA AMIRULLAH	TEMPE	
19	WARKOP VETERAN	JL.VETERAN NO 229 SENGKANG	TEMPE	
20	WARKOP ANDI NINNONG	JL. ANDI NINNONG	TEMPE	
21	FIVE BROTHERS CAFE	JL. DAHLIA NO.3	TEMPE	
22	RUMAH KOPI	JL. IRIAN	TEMPE	
23	WARKOP AURA PATTIROSOMPE	JL. SAWERIGADING	TEMPE	
24	JANJI JIWA	JL. BAU BAHARUDDIN	TEMPE	
25	TIME OUT CAFÉ N BISTRO	JL. SUNGAI WALENNAE	TEMPE	
26	CAFÉ 99	JL. A. PAGGARU	TEMPE	
27	MOKOPI	JL. JEND. SUDIRMAN	TEMPE	
28	WARKOP 34	JL. JEND. SUDIRMAN	TEMPE	
29	TRIPLE 888	JL. PUANGRIMAGGALATUNG	TEMPE	
30	DOMINAN COFFE	JL. SULAWESI	TEMPE	
31	WARKOP TEMANG'E	JL. MESJID RAYA	TEMPE	
32	BERODER COFFE	JL. A. MAGGA AMIRULLAH	TEMPE	

4. Rumah Bernyanyi

Tabel 5.4
DATA RUMAH BERNYANYI DI KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

NO.	NAMA RUMAH BENYANYI	LOKASI	KECAMATAN	KET
1	COLOR	JL.RA KARTINI NO 45 SENGKANG	TEMPE	
2	PASSANGGRAHAN	JL. LAMUNGKACE TOADDAMANG	TEMPE	
3	SL SWEET	JL. MUHAMMADIYAH NO 1	TEMPE	

NO.	NAMA RUMAH BENYANYI	LOKASI	KECAMATAN	KET
4	RIEN KARAOKE	JL. JEND SUDIRMAN SENGKANG	TEMPE	
5	BERINGIN 77	JL. BERINGIN SENGKANG	TEMPE	
6	REZA KARAOKE	JL. ANDI UNGRU DS ASORAJANG	TANASITOLO	
7	ABB KARAOKE	ATAKKAEL KEL. ATAKKAEL	TEMPE	
8	GALAXI	JL. OLAHRAGA KEL. SOMPE	SABBANGPARU	
9	RUMAH BERNYANYI KELUARGA	PAORAMBA KEL. TALOTENRENG	SABBANGPARU	

Keberadaan industri dan investasi pariwisata sebagai motor penggerak berkembangnya produk wisata yang akan ditawarkan kepada wisatawan tentu saja menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian. Secara ekonomi, investasi tersebut mampu meningkatkan kelayakan sektor pariwisata yang bersifat sebagai destinasi pariwisata yang mampu menarik perhatian wisatawan datang berkunjung. Tentu saja strategi ini diharapkan menjadi salah satu hal yang mampu mendorong peningkatan keberhasilan sektor pariwisata daerah dengan mendorong peningkatan populasi pertumbuhan investasi pariwisata sehingga peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola industri kecil dan menengah yang dihadapi dapat berjalan dengan lancar serta mampu meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk datang berkunjung.

Pembuatan regulasi dan skema sistem informasi kesempatan melakukan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai fasilitator untuk mempropagandakan produk wisata Kabupaten Wajo sehingga pihak swasta merasa tertarik untuk melakukan investasi. Hal ini juga dapat dilakukan dengan mengadakan promosi dan pameran pariwisata dengan memaparkan peluang-peluang investasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan sektor pariwisata Kabupaten Wajo dengan mengundang para investor

mengunjungi produk wisata yang akan ditawarkan dan jenis investasi yang dapat dilakukan.

Guna mendukung strategi peningkatan pertumbuhan populasi investasi pariwisata melalui berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan masyarakat sebagai pelaku usaha dan pihak swasta sebagai investor juga diperlukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala yang akan dihadapi oleh investor ketika akan melakukan kegiatan investasinya. Hal ini untuk mendukung peningkatan kerjasama yang dapat berlangsung secara berkelanjutan sehingga semakin meningkatkan kemampuan pariwisata ketika bersaing merebut pasar wisatawan. Pemberian kemudahan-kemudahan melalui berbagai program pun dapat dilakukan, seperti pemberian insentif tertentu pada sektor investasi unggulan, atau perbaikan regulasi-regulasi investasi sehingga keinginan untuk melakukan investasi dapat berlangsung dengan pola kemitraan tertentu dan berkesinambungan.

BAB 6

PASAR PARIWISATA DAN UPAYA PEMASARAN



6.1. Jumlah dan Perkembangan Pasar Wisatawan

Pemasaran pariwisata pada dasarnya terdiri dari dua ranah pokok, yaitu produk yang berperan sebagai *supply side* dan pasar yang berperan sebagai *demand side*. Agar dapat menarik perhatian wisatawan ditinjau dari sisi pasar maka daerah tujuan wisata perlu mengetahui harapan dan keinginan pasar dengan jelas. Kondisi pasar pariwisata global telah meninggalkan era *mass tourism/mass market* bergeser kepada *special tourism/interest market/alternative tourism/green tourism*. Wisatawan jenis ini menginginkan suasana lingkungan yang dikunjungi merupakan suasana baru dan menginginkan bentuk dari pariwisata alternatif atau pariwisata berkelanjutan (kawasan yang relatif tidak terganggu).

Kabupaten Wajo memiliki karakteristik produk yang diinginkan oleh pasar, pendekatannya berdasarkan sumber daya alam yang masih relatif tidak terganggu dan tingkat kepadatan

pengembangan rendah (tidak didominasi bangunan fisik). Mengingat pasarnya sangat spesifik maka pemasarannya harus tepat sasaran, hal yang sangat penting adalah usaha membangun marketing channel national dan international.

Analisis pasar dan pemasaran pariwisata, dimaksudkan untuk menemukan potensi dan karakteristik calon pasar bagi wilayah perencanaan antara lain dari segi kuantitatif dan kuantitatif yang meliputi asal wisatawan, lama tinggal, dan karakteristik wisatawan. Analisis pasar ini akan menentukan arah pengembangan atraksi dan produk wisata yang akan dikembangkan, kebutuhan sarana transportasi serta kebutuhan akomodasi. Analisis pasar ke wilayah perencanaan harus memperhatikan: pola kunjungan wisatawan (mancanegara dan domestik) ke wilayah yang lebih luas (lingkup provinsi, atau wilayah tujuan wisata yang lebih luas), mengingat wilayah perencanaan adalah tingkat kota. Selain itu, pada bagian ini juga dilakukan analisis pemasaran secara khusus seperti permasalahan promosi dan penjualan produk kepariwisataan.

Tabel 6.1
Data Kunjungan Wisatawan

WISATAWAN	2015	2016	2017	2018	2019
NUSANTARA	67,942	68,648	78.012	79,005	81,019
MANCANEgara	2,940	2.847	3,125	3,510	1,987

Melihat kondisi jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Wajo, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang mengalami peningkatan tiap tahunnya meskipun tidak terlalu signifikan telah menunjukkan bahwa

pariwisata Kabupaten Wajo memiliki potensi pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk datang berkunjung. Strategi pengembangan pasar pariwisata Kabupaten Wajo saat ini telah banyak dilakukan pada usaha pembentukan citra kota dan peningkatan kegiatan promosi. Berbagai upaya promosi yang telah dilakukan seperti menyediakan bahasa internasional dalam website promosinya sehingga lebih mudah dipahami oleh wisatawan mancanegara, menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam bentuk *event-event* maupun festival yang bersifat nasional maupun internasional, menyelenggarakan berbagai kegiatan pameran wisata baik dengan mengirimkan pesertanya ke luar Kabupaten Wajo maupun pameran wisata yang digelar di Kabupaten Wajo sendiri. Berbagai upaya yang juga dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo dan partisipasi masyarakat dalam membentuk citra daerah telah mampu meningkatkan kondisi pariwisata Kabupaten Wajo.

6.2. Karakteristik Pasar Wisatawan

Kajian pasar dan proyeksi wisatawan dilakukan untuk menemukenali potensi dan karakteristik calon pasar yang tepat bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Wajo. Metode survey langsung dan wawancara dengan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Wajo merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik wisatawan yang melakukan perjalanan.

a. Karakteristik Geografis

Perbandingan dari sisi asal geografis wisatawan cukup berimbang, artinya semua daya tarik wisata ini terbuka untuk semua kalangan baik yang berasal dari luar maupun dalam wilayah Kabupaten Wajo. Tidak ada hal yang mencolok atau dominan dalam segi asal geografis wisatawan. Mayoritas

wisatawan berasal dari wilayah-wilayah di sekitar daya tarik wisata dan sedikit dari luar kabupaten. Selain itu secara geografis, wilayah Kabupaten Wajo memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas dengan jarak tempuh yang tidak terlalu lama antara satu daya tarik wisata ke daya tarik wisata yang lain sehingga dapat meminimalkan waktu perjalanan. Faktor lain juga disebabkan oleh kemudahan aksesibilitas seperti jalan yang menghubungkan Kabupaten Wajo dengan daerah lainnya dapat dengan mudah diakses melalui perjalanan darat.

b. Karakteristik Sosiodemografis

Secara umum, karakteristik sosiodemografis wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Kabupaten Wajo tidak jauh berbeda, yakni proporsi memiliki jumlah proporsi wisatawan laki-laki dan perempuan yang seimbang. Jenis kelamin selalu dikaitkan dengan aspek gender, karena terjadi diferensiasi peran sosial yang melekat pada masing-masing jenis kelamin. Kegiatan pariwisata sejatinya perbedaan jenis kelamin mempunyai pengaruh dalam pemilihan destinasi maupun aktivitas yang dilakukan wisatawan. Namun untuk jenis wisata misalnya seperti danau tempe hal tersebut tidak berlaku. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menyukai aktivitas berwisata di air.

Mayoritas wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Kabupaten Wajo berusia antara 15-60 tahun. Pada rentang usia ini para wisatawan juga masih produktif dan lebih banyak melakukan kegiatan berwisata. Mayoritas wisata memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Tingkat pendidikan dapat menjadi alasan bagi orang untuk berwisata, karena pada dasarnya setiap wisatawan berkeinginan mencari dan menemukan pengalaman fisik atau psikologis sesuai minat masing-masing.

Aktivitas pariwisata biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap, karena mereka sudah mampu melakukan perencanaan pengeluaran. Selanjutnya mayoritas wisatawan yang datang merupakan jenis wisatawan yang berulang / *repeater tourist*, merupakan wisatawan yang bersifat kunjungan pribadi bersama keluarga dan teman, hanya menghabiskan waktu 1-2 jam selama berkunjung dan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor/mobil).

c. Karakteristik Psikografis

Wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata Kabupaten Wajo cenderung wisatawan yang berkarakter psikosentris. Wisatawan yang datang cenderung lebih menyukai sesuatu yang umum, jamak, populer dengan frekuensi berwisata yang cenderung rendah, wisatawan cenderung memilih aktivitas yang bersifat umum selama berlibur di daya tarik wisata, lama tinggal cukup singkat dan wisatawan lebih berminat pada daya tarik wisata yang telah dikembangkan dan populer.

d. Karakteristik Tingkah Laku

Karakteristik tingkah laku/behaviour wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Kabupaten Wajo ini mayoritas berkunjung untuk rekreasi atau liburan dengan menikmati atraksi. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung mendapatkan informasi dari teman/saudara untuk berkunjung.

e. Profil Wisatawan Mancanegara

1) Wisatawan Mancanegara Asal Perancis

- a) Sangat tertarik akan kebudayaan setempat, upacara, termasuk budaya tradisional, cara hidup, tari, drama, musik dan kesenian, upacara keagamaan, serta desa-desa tradisional.

- b) Sangat tertarik mengunjungi atraksi wisata minat khusus terutama situs arkeologi, candi dan tempat yang tidak terlalu komersial dan agak terpencil.
- 2) Wisatawan Mancanegara Asal Jerman
- a) Berminat pada budaya tradisional, upacara keagamaan, tari-tarian, tempat bersejarah, pemandangan indah dan suka membandingkan budaya tradisional yang satu dengan yang lainnya.
 - b) Lebih memilih tempat yang mudah dicapai dan tidak terlalu terpencil. Ingin melihat keseluruhan atraksi wisata dan kadang menghabiskan waktu untuk meneliti atraksi tersebut.
- 3) Wisatawan Mancanegara Asal Inggris
- a) Tertarik akan budaya tradisional serta pantai.
 - b) Sopan dan berkelakuan baik serta ramah. Dibandingkan dengan orang Eropa lainnya, orang Inggris tidak terlalu terbuka. Mereka sangat menghargai privasi.
- 4) Wisatawan Mancanegara Asal Italia
- a) Mereka berminat pada budaya tradisional, kesenian serta pemandangan romantis seperti pantai dengan pohon kelapa.
 - b) Orang Italia adalah orang yang terbuka,romantis, ekspresif dan cenderung berisik terutama dengan sesama orang Italia.
- 5) Wisatawan Mancanegara Asal Belanda
- a) Memiliki keterikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia dan senang mengunjungi tempat yang pernah ditinggali dan ditempati bekerja atau tempat

- yang mereka dengar dari kerabat serta yang dipelajari di sekolah.
- b) Sangat tertarik akan kebudayaan dan pemandangan alam, pantai serta perkembangan pembangunan/kemajuan saat ini.
- 6) Wisatawan Mancanegara Asal Amerika (USA & Canada)
- a) Mereka tertarik pada bentuk kebudayaan yang lebih mudah dinikmati seperti tarian dan upacara adat namun tidak tertarik secara mendalam terhadap kebudayaan serta pemandangan indah.
 - b) Meminati hotel mewah dengan pelayanan yang baik, transportasi yang nyaman seperti taksi dan bus ber-AC.
- 7) Wisatawan Mancanegara Asal Australia
- a) Menyukai budaya tradisional, pedesaan, kegiatan pantai (terutama yang muda) tapi tidak berminat untuk mendalami kebudayaan. Sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang Indonesia.
 - b) Mereka ramah tidak bertele-tele, senang bergurau, tidak formal serta senang berhubungan dengan penduduk lokal.
- 8) Wisatawan Mancanegara Asal Jepang
- a) Tidak terlalu tertarik dengan budaya dan atraksi wisata. Mereka ikut dalam tur untuk melihat atraksi sekilas dan lama tinggal relatif singkat.
 - b) Selalu bepergian dalam kelompok dan selalu mengikuti jadwal tur dan jarang membatalkan perjalanan yang telah direncanakan.

- 9) Wisatawan Mancanegara Asal Singapura
 - a) Tertarik akan keindahan alam dan perkembangan pembangunan hanya tertarik sekilas akan budaya.
 - b) Minat khusus mereka adalah berjudi di Jakarta dan kehidupan malam.
- 10) Wisatawan Mancanegara Asal Malaysia
 - a) Tertarik akan keindahan alam termasuk pantai, dan perkembangan pembangunan, kurang tertarik akan kesenian dan budaya. Sebagian orang Malaysia memiliki hubungan dan kerabat dengan orang Indonesia terutama orang Sumatera dan sering mengunjungi teman dan kerabat serta daerah asal.
 - b) Kebanyakan orang Malaysia berwisata secara kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka wisatawan mancanegara yang sesuai dengan produk wisata di Kabupaten Wajo adalah wisatawan yang menyenangkan atau sangat tertarik dengan kebudayaan setempat, upacara, termasuk budaya tradisional, cara hidup, tarian, drama, musik dan kesenian, upacara keagamaan, serta desa-desa tradisional dan sangat tertarik mengunjungi atraksi wisata minat khusus terutama situs arkeologi, candi dan tempat yang tidak terlalu komersial dan agak terpencil.

6.3 Upaya Pemasaran Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Wajo

Selanjutnya untuk strategi pengembangan pasar dan promosi pariwisata Kabupaten Wajo dapat dilakukan melalui :

- a. Menemukenali pasar wisatawan Kabupaten Wajo serta motivasi wisatawan untuk datang berkunjung sehingga

mampu menjadi prospek wisatawan datang berkunjung kembali maupun menceritakan pengalaman pariwisatanya di Kabupaten Wajo

- b. Meningkatkan citra positif Kabupaten Wajo yang sudah terbentuk sesuai dengan kenyataannya. Hal ini diperlukan agar kepercayaan wisatawan yang telah berkunjung tetap berada pada kondisi terbaik Kabupaten Wajo
- c. Pengembangan usaha pemasaran wisata pada masyarakat luas, baik berupa iklan di media massa, penyebaran melalui jejaring sosial, maupun meningkatkan kualitas kerjasama antara pemerintah, organisasi yang bergerak dibidang pariwisata, dan termasuk dengan masyarakat Kabupaten Wajo sendiri.
- d. Perbaikan dan peningkatan terhadap kegiatan-kegiatan promosi yang telah ada dan mengembangkan strategi-strategi baru sesuai pasar wisatawan Kabupaten Wajo
- e. Pembuatan paket-paket wisata beserta daya tarik yang akan ditampilkan yang kemudian dimasukkan dalam kegiatan promosi wisata
- f. Mengaitkan kegiatan-kegiatan pariwisata daerah sekitar dengan kegiatan-kegiatan pariwisata di Kabupaten Wajo sehingga mampu menjadi penggerak promosi Kabupaten Wajo secara tidak langsung

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Kabupaten Wajo secara makro memerlukan penetapan area-area pengembangan pariwisata. Hal ini didasari oleh berbagai macam daerah tujuan wisata yang tersebar di Kabupaten Wajo, sehingga untuk melakukan pengembangan dapat melihat bentuk potensi pariwisata yang ada dengan menyesuaikan dari kesamaan dalam berbagai hal.

Tiap-tiap area juga kemudian akan ditetapkan pusat dan sub-sub pengembangan kawasan wisata. Penetapan area-area ini dapat dilakukan dengan melakukan pembagian **Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK)** dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya kesatuan ruang yang dapat kita lihat misalnya dengan kedekatan lokasi antar daerah tujuan wisata yang satu dengan yang lainnya
- b. Daerah tujuan wisata tersebut telah dikembangkan atau telah dikelola oleh pemerintah, prasarana jalan sudah baik, sehingga dapat mendukung kegiatan wisatawan dalam melakukan kegiatan wisatanya
- c. Daerah tujuan wisata sudah memiliki ketertarikan daya tarik wisata tersendiri sehingga sudah banyak dikenal oleh masyarakat Kabupaten Wajo pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
- d. Sudah tersedianya fasilitas pelayanan wisata meskipun belum lengkap
- e. Aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata dapat dijangkau dengan mudah terutama melalui transportasi darat.

BAB 7

KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN



7.1. Sumber Daya Manusia Pariwisata

Keberadaan sumber daya manusia berperan penting dalam pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (*tourist*) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran sumber daya manusia sebagai pekerja dapat berupa sumber daya manusia di lembaga pemerintah, sumber daya manusia yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

Sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan individu/pelaku industry pariwisata yang secara langsung ataupun tidak

langsung memiliki interaksi/keterkaitan dengan seluruh komponen pariwisata. SDM pariwisata memegang peranan penting dalam menggerakkan roda industri ini.

Sumber daya manusia pariwisata adalah seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata baik bersifat tangible maupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata. Pariwisata sebagai sebuah industri yang sangat bergantung pada keberadaan manusia.

Terwujudnya pariwisata merupakan interaksi dari manusia yang melakukan wisata yang berperan sebagai konsumen yaitu pihak-pihak yang melakukan perjalanan wisata/wisatawan dan manusia sebagai produsen yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Sehingga aspek manusia salah satunya berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata di suatu negara.

Sumber daya manusia pariwisata merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata. Pentingnya SDM di sektor pariwisata adalah manusia (people) merupakan sumber daya yang sangat penting di sebagian besar organisasi. Pada beberapa industri, faktor manusia berperan penting dan menjadi faktor kunci sukses terhadap pencapaian kinerja. Seperti pada industri pariwisata, dimana perusahaan memiliki hubungan langsung yang bersifat intangible (tak berwujud) dengan konsumen yang sangat bergantung pada kemampuan individu karyawan dalam membangkitkan minat dan menciptakan kesenangan serta kenyamanan kepada para konsumennya.

Demikian juga atraksi wisata di suatu daerah tujuan wisata, intinya merupakan faktor manusia yang akan menentukan apakah para pengunjung (wisatawan) akan memperoleh pengalaman total dan akan berkunjung kembali. Pengembangan SDM di industri pariwisata saat ini menghadapi tantangan global yang memerlukan solusi dengan menembus batasan-batasan Negara, wilayah dan benua. Salah satu solusi yang perlu ditempuh adalah dengan meningkatkan kompetensi SDM yang dimiliki suatu Negara termasuk Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang tepat.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa terdapat beberapa peran penting keberadaan SDM di industri pariwisata, yaitu sebagai motor penggerak kelangsungan industri; pelaku utama yang menciptakan produk inti pariwisata (pengalaman); dan salah satu faktor penentu daya saing industri.

7.2. Asosiasi Pariwisata

Asosiasi/organisasi kepariwisataan adalah lembaga atau wadah yang memperlancar operasional usaha wisata, sekaligus menjadi tempat untuk saling berbagi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Asosiasi pariwisata ini berfungsi dan berperan sebagai lembaga legislasi, eksekusi dan yudikasi industri pariwisata.

Asosiasi-asosiasi pariwisata tersebut antara lain adalah:

a. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia merupakan organisasi perusahaan yang beranggotakan pengusaha hotel, restoran, jasa pangan, jasa boga dan lembaga pendidikan pariwisata.

PHRI merupakan organisasi yang berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kepariwisataan, dalam rangka

ikut serta melaksanakan pembangunan nasional serta merupakan wadah pemersatu dalam memperjuangkan dan menciptakan iklim usaha yang menyangkut harkat dan martabat pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa pariwisata.

b. *Association of Indonesian Tour and Travel Agency (ASITA)*

Association of Indonesian Tour and Travel Agency atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia merupakan organisasi nonprofit yang beranggotakan para pengusaha biro perjalanan dan agen perjalanan. ASITA bertujuan membangun citra pariwisata Indonesia, menjadi penengah antara para pengusaha travel dan pihak-pihak lain,

c. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)

Himpunan Pramuwisata Indonesia semula bernama Himpunan Duta Wisata Indonesia yang didirikan di Palembang, yang merupakan organisasi profesi non politik dan mandiri sebagai wadah tunggal pribadi-pribadi yang memiliki profesi sebagai pramuwisata. HPI merupakan asosiasi tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

d. Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI)

Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia merupakan wadah bagi pengelola kawasan pariwisata yang pada umumnya mencakup lahan cukup luas dan beragam permasalahannya. Kepemilikan lahan tidak selalu ada pada pemerintah, tetapi juga yang dikuasai oleh masyarakat setempat.

e. Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI)

Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia merupakan wadah bagi Pelaku Pariwisata Indonesia untuk membantu usaha pemerintah dalam membina dan memajukan pariwisata nasional.

f. Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia (ASPEHINDO)

Asosiasi Pengusaha Hiburan Indonesia merupakan wadah mandiri dan non partisan bagi pengusaha hiburan untuk membangun usahanya serta membangun kepariwisataan secara umum.

Untuk Kabupaten Wajo, kondisi saat ini (existing) asosiasi kepariwisataan yang terbentuk dan ada, hanya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), itupun mengalami kevakuman kepengurusan selama 10 tahun terakhir ini.

7.3. Kelembagaan Pemerintah Terkait Pariwisata

Kelembagaan Kepariwisata, sebagaimana pengertiannya yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, adalah: **“kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.”**

Dengan kata lain, Kelembagaan Kepariwisata merupakan suatu integrasi antara pemerintah, organisasi, pelaku pariwisata, peraturan, dan teknis pelaksanaan, yang berlangsung secara terus-menerus, agar tujuan kepariwisataan secara nasional, regional, dan lokal dapat tercapai.

Pada peraturan atau regulasi yang sama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS, secara umum pengembangan konsep kelembagaan lebih berorientasi kepada bagaimana pemerintah kabupaten dapat meningkatkan partisipasi semua pihak dalam rangka pengembangan

kepariwisataan. Dalam konteks pelaksanaan program dan kegiatan nantinya memang merupakan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah, tetapi peran serta masyarakat, lembaga masyarakat dan pihak swasta diharapkan dapat lebih berperan. Konsepsi pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang akan dikembangkan meliputi:

1. Penguatan Organisasi Kepariwisata
2. Pembangunan SDM Pariwisata
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Sebuah kelembagaan yang jelas yang perlu dilakukan dalam pengelolaan pariwisata. Sehingga dapat berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata itu sendiri. Kelembagaan juga memerlukan sebuah koordinasi dari setiap tupoksinya sendiri-sendiri. Karena koordinasi merupakan hal penting yang perlu dilakukan dalam konteks kerja sama pembangunan yang melibatkan banyak pelaku, baik dalam konteks dinas/lembaga/kantor Wajo maupun yang melibatkan sektor swasta/investor dan masyarakat.

Diperlukan arahan-arahan untuk mengupayakan agar fungsi dari sebuah sistem kelembagaan tersebut jelas dan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Arahan-arahan tersebut adalah:

1. Adanya sebuah sistem yang jelas dalam sebuah kelembagaan dengan adanya kepala dan staf-staf nya;
2. Terdapat struktur organisasi kelembagaan yang jelas dengan mempunyai tupoksi (tugas pokok & fungsi) yang jelas dan harus dipertanggungjawabkan.
3. Menyelenggarakan proses rapat koordinasi pembangunan yang menekankan pada pola penganggaran yang efisien, koordinatif, adanya prioritas yang jelas.

4. Adanya sebuah kerjasama internal antara Pemda dengan pihak swasta, sehingga dapat terjadi sebuah koordinasi yang baik yang berpengaruh terhadap perkembangan sektor pariwisata itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, kelembagaan pemerintah terkait pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Wajo dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai salah satu Perangkat Kerja Daerah di Kabupaten Wajo, diberi kewenangan mengurus pariwisata di Kabupaten Wajo

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 110 Tahun 2019 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata terhadap pelaksana tugas perangkat daerah.

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Wajo ada beberapa upaya yang bisa dilakukan diantaranya yaitu, Pemerintah Kabupaten Wajo perlu memberikan otoritas lebih kepada dinas yang khusus membidangi pariwisata dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo untuk mengelola daya tarik wisata yang ada. Bilamana perlu Pemerintah Kabupaten Wajo perlu membuat kebijakan yang fokus pengembangan pariwisata yang dikelola mandiri oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Wajo

7.4. Kelembagaan Lain Terkait Pariwisata

Pembentukan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan kesesuaian pada tahap mana atau fase dalam siklus sebuah destinasi pariwisata (*life cycle destination*). Tahap eksplorasi akan berbeda jumlah dan kualitas lembaganya, begitu

pula manakala sudah pada tahapan yang lebih tinggi misalnya pengembangan (*involvement*), akan berbeda pula tipologi keberadaan lembaga pariwisatanya.

Kemajuan pariwisata banyak dipengaruhi oleh profesionalisme dan eksistensi lembaganya (*tourism institutions*). Semakin maju lembaga pariwisata (kuantitas dan kualitas) maka cenderung akan semakin maju pula, kemajuan pariwisata dalam suatu daerah. Oleh karena itu dalam usaha mencapai hal tersebut, diperlukan langkah-langkah praktis dalam membangun beberapa lembaga pariwisata.

Berdasarkan hasil pengamatan keberadaan lembaga pariwisata di Kabupaten Wajo secara umum relatif masih minim dan belum fokus terkait dengan fungsi dan perannya. Berdasarkan kondisi saat ini (*existing*) ternyata lembaga pariwisata yang diinventarisir yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah (Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata)
2. Swasta : PHRI (vakum kepengurusan)
3. Masyarakat : Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata, dll.

Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu mewujudkan pengembangan kelembagaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ada beberapa usaha pengembangan yang bisa dilakukan yaitu :

Pertama, pemerintah perlu memberikan otoritas lebih kepada dinas yang khusus membidangi pariwisata dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata untuk mengelola daya tarik wisata yang ada. Bilamana perlu Pemerintah Kabupaten Wajo perlu membuat kebijakan yang fokus pengembangan pariwisata yang dikelola mandiri oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kedua, swasta dibutuhkan pembentukan asosiasi-asosiasi industri pariwisata terkait dengan himpunan pramuwisata dan pengembangan wisata bahari. Nama organisasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Wajo yaitu GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)

Ketiga, dalam rangka menumbuhkan inovasi dan kreativitas masyarakat, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan pariwisata. Konkritnya masyarakat Wajo perlu diberdayakan melalui *community based developmet* atau pariwisata yang berbasis komunitas lokal. Usaha pengembangan yang bisa dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola di masing-masing DTW yang ada di Kabupaten Wajo. Langkah awal, dapat dimulai dengan pembentukan lembaga pengelola pada DTW-DTW yang sudah berkembang, kemudian disusul organisasi pengelola pada DTW-DTW yang potensial (belum berkembang).

Keempat, Kolaborasi (*mix institutions*): lemahnya power lembaga pariwisata dalam menggerakkan kemajuan pengembangan pariwisata, banyak diakibatkan karena kurang terpadu (*integrated*) dalam membangun pariwisata. *stakeholder* pariwisata cenderung berjalan sendiri-sendiri, tanpa memperdayakan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga lain. Apabila bisa dibangun kerjasama dan mutual benefit melalui kepercayaan bersama (*mutual trust*) maka pariwisata akan bisa dikembangkan lebih optimal. Bentuk asosiasi yang bisa dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Wajo yaitu organisasi yang berbasis pada *stakeholder* pariwisata: GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dan BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah)

Tabel 7.1
KELEMBAGAAN PARIWISATA DI KAB. WAJO

Kelembagaan	Kondisi Saat Ini	Pengembangan
Pemerintah	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
Swasta	PHRI	HPI, ASITA
Masyarakat	Pemerintah Desa dan Pokdarwis	Badan Pengelola DTW
Kolaborasi		GIPI dan BPPD

Penguatan organisasi akan diarahkan kepada kemandirian organisasi baik secara kegiatan, program kerja, dukungan teknis atau pengembangan jaringan kerjasama. Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan yang akan dikembangkan, meliputi:

- a. Reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan kabupaten
- b. Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten
- c. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata
- d. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata
- e. Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

Strategi untuk akselerasi reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi, meliputi:

- a. Memperkuat tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur kementerian
- b. Memperkuat kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan
- c. Memperkuat mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal kementerian maupun lintas sektor.

Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kabupaten Wajo, meliputi:

- a. Memperkuat fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa
- b. Meningkatkan usaha pariwisata terkait
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- d. Meningkatkan pelestarian lingkungan.

Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata, meliputi:

- a. Memperkuat struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah
- b. Memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata
- c. Memperkuat kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.

Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata, meliputi:

- a. Memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata

- b. Memperkuat kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.

Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata, meliputi:

1. Memperkuat struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat Pemerintah
2. Memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi
3. Memperkuat kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.

BAB 8

PRINSIP DAN KONSEP PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN WAJO



8.1. Tantangan dan Isu Strategis Pembangunan Kepariwisataaan

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang disusun menurut urusan pemerintahan daerah yang dimaksudkan untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah kabupaten guna mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

Identifikasi dimaksud meliputi urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang. Untuk lebih jelasnya mengenai pengidentifikasian permasalahan tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

No	Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Kunjungan wisata	1 Objek daya tarik wisata di kabupaten wajo belum dikembangkan secara maksimal	1 Meningkatkan pengembangan objek daya tarik wisata
		2 Promosi pariwisata ke luar daerah belum di maksimalkan	2 Melaksanakan promosi pariwisata ke dalam dan luar daerah secara maksimal
2	Lama kunjungan Wisata	1 Belum optimalnya promosi wisata	1 Peningkatan promosi kepariwisataan
		2 Belum berkualitasnya sarana dan prasarana objek wisata	2 Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana objek wisata
		3 Rendahnya dukungan pihak swasta	3 Partisipasi swasta bidang kepariwisataan
3	PAD sektor pariwisata	1 Masih rendahnya PAD sektor pariwisata	1 Meningkatkan PAD sektor pariwisata

Dari permasalahan tersebut di atas, dapat dilihat tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo dari sisi internal antara lain:

- a. Destinasi/objek wisata yang tumbuh tanpa perencanaan seutuhnya (kuantitas dan kualitas belum memadai), baik dari sisi infrastruktur dan ketersediaan akomodasi
- b. Pengelolaan kebersihan destinasi/objek wisata yang belum optimal
- c. Sinergitas dan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan yang belum terbangun.

Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi:

- a. Adanya daya tarik wisata yang hampir seragam yang ditawarkan
- b. Pengelolaan objek dan daya tarik wisata yang belum terkoordinasi dengan baik
- c. Kemajuan teknologi yang belum dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

Berdasarkan tantangan-tantangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo

- a. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi.
- b. Pengembangan pariwisata melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat
- c. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata
- d. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
- e. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi
- f. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perizinan dan ketersediaan lahan

8.2. Prinsip Pembangunan Kepariwisataan

Arah pembangunan kepariwisataan saat ini telah mengalami pergeseran ke pembangunan kepariwisataan yang berbasis komunitas dan bersandar pada ekonomi berbasis kerakyatan serta

menekankan pemeliharaan lingkungan hidup secara berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut, RIPPARKAB Kab. Wajo memiliki beberapa prinsip dasar yang mempengaruhi pembangunan kepariwisataan dalam pencapaian tujuan, antara lain:

- a. Prinsip Keseimbangan: Pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada komitmen pola keseimbangan antara ekonomi dan pelestarian lingkungan (alam dan budaya)
- b. Prinsip Konservasi: Pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat setempat.
- c. Prinsip Partisipasi masyarakat: Pembangunan kepariwisataan harus melibatkan peran serta masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan kepariwisataan.
- d. Prinsip Keterpaduan: Pembangunan kepariwisataan harus direncanakan sebagai satu kesatuan ekosistem, dan keterpaduan lintas sektor/pelaku (pemerintah-industri-masyarakat)

8.3. Konsep Pembangunan Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ke tataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan pembangunan kepariwisataan bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional.

Mekanisme pembangunan kepariwisataan secara keseluruhan pada dasarnya berlangsung pada suatu kawasan pada suatu wilayah tertentu selalu akan memiliki pengaruh terhadap wilayah yang melingkupinya baik yang berupa efek langsung (*direct effect*), efek tak langsung (*indirect effect*), dan efek ikutan (*induced effect*).

Sehubungan dengan hal tersebut kebijakan konsep serta arahan dan program-program implementasi yang direkomendasikan akan bertumpu pada tatanan:

- a. Layak secara ekonomi (*economically viable*)
- b. Berwawasan lingkungan (*environmentally viable*)
- c. Diterima secara sosial (*socially acceptable*)
- d. Dapat diterapkan secara teknologis (*technologically appropriate*)

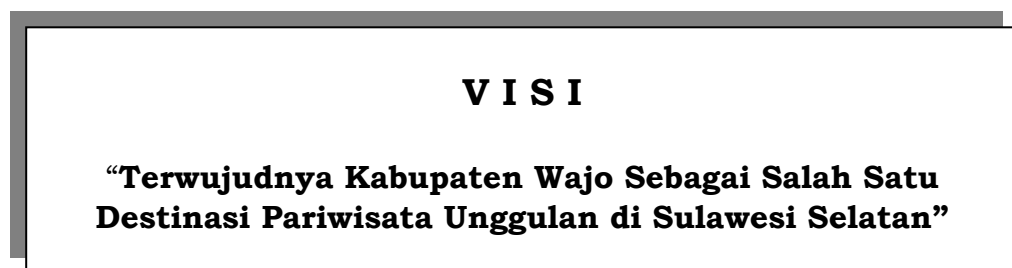
Konsep pembangunan kepariwisataan berkelanjutan tersebut menghendaki ketaatan pada asas-asas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berpijak pada aspek pelestarian dan berorientasi ke depan (jangka panjang)
- b. Penekanan pada nilai manfaat yang besar bagi masyarakat lokal
- c. Prinsip pengelolaan aset sumber daya yang tidak merusak tapi lestari
- d. Kesesuaian antara kegiatan pembangunan kepariwisataan dengan skala, kondisi dan karakter suatu kawasan yang akan dikembangkan.
- e. Keselarasan yang sinergis antara kebutuhan audience pariwisata, lingkungan hidup dan masyarakat lokal dengan bermuara pada pengembangan apresiasi yang lebih peka pada warisan budaya, lingkungan hidup dan jati diri bangsa dan agama.

- f. Antisipasi yang tepat terhadap proses perubahan yang terjadi dan berorientasi pada memperkuat potensi lokal dan kemampuan masyarakat sekitar.

8.4. Visi

Visi Pembangunan Pariwisata Kabupaten Wajo Tahun 2013-2025 adalah:



Penjelasan visi tersebut adalah bahwa visi tersebut mengandung makna adanya hasrat untuk mewujudkan Pariwisata Kabupaten Wajo agar berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*) dan mendukung Visi Kabupaten Wajo.

Makna pokok yang tersirat dalam visi Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo mengandung arti bahwa Kabupaten Wajo yang memiliki potensi objek daya tarik wisata alam, budaya dan buatan manusia yang unggul diharapkan mampu menarik wisatawan baik nusantara maupun mancanegara sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan wisata utama.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan misi yang merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai.

Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya.

8.5. Misi

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo maka ada lima misi yang perlu dilakukan yaitu:

M I S I

1. Pembangunan kepariwisataan yang mampu menciptakan tatanan yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan penataan ruang dan wilayah kepariwisataan yang terintegrasi dalam semua aspek pembangunan daerah;
2. Pembangunan destinasi wisata yang berbasis potensi daerah, budaya lokal, menarik, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Pembangunan sistem pemasaran pariwisata yang sinergi, menarik dan berbasis kepada teknologi informasi dan mampu menjangkau semua wilayah;
4. Pembangunan industri kepariwisataan yang berbasiskan pembangunan ekonomi kreatif, mampu meningkatkan nilai tambah industri lokal dan menciptakan peluang bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
5. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang profesional, bertanggung jawab dan menciptakan sumber daya manusia kepariwisataan yang menyokong pembangunan kepariwisataan daerah

8.6 Tujuan

Tujuan dari Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wajo adalah:

- a. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berbasis lingkungan, berkelanjutan dan berdaya saing.
- b. Menciptakan pembangunan kepariwisataan yang tertata dan sesuai dengan pengembangan tata ruang dan wilayah.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
- d. Meningkatkan sistem pemasaran pariwisata dalam rangka menyebarkan informasi secara luas bagi seluruh masyarakat sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata.
- e. Mewujudkan industri kepariwisataan yang berbasis kepada industri kreatif dan potensi industri lokal serta menjadikan usaha mikro kecil dan menengah sebagai pendukung utama pembangunan industri kepariwisataan.
- f. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang tertata dengan baik mampu mensinergikan pembangunan pariwisata berbasis lingkungan, pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata

BAB 9

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN



9.1. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

9.1.1. Kebijakan Umum Pembangunan kepariwisataan

Kebijakan umum pembangunan kepariwisataan Kabupaten Wajo adalah:

- a. Pembangunan wisata berbasis keberlanjutan dan ramah lingkungan
- b. Pembangunan wisata yang dilaksanakan sebagai sektor utama pembangunan daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan mampu mengatasi kemiskinan.
- c. Pembangunan pariwisata yang fokus pada tiga kawasan pembangunan kepariwisataan yaitu kawasan wisata Danau Tempe, Kawasan Agro Wisata Sutera dan Kawasan Wisata Perumahan Adat Attakae dan sebagai stimulus terhadap kawasan wisata lainnya.

- d. Pembangunan industri pariwisata yang mendorong pengembangan industri kreatif.
- e. Pembangunan kepariwisataan terpadu, lintas sektoral, dan tata kelola yang baik.
- f. Pembangunan kepariwisataan yang mendorong kemitraan antara sektor publik dengan sektor private.

9.1.2. Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Berbasis Tata Ruang Dan Wilayah

Kebijakan Kepariwisata Berbasis Tata Ruang Dan Wilayah

- a. Penataan ruang dan wilayah untuk kepariwisataan
- b. Pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kepariwisataan

9.1.3. Kebijakan Pembangunan Destinasi Kepariwisata

Kebijakan Pembangunan Destinasi kepariwisataan

- a. Mewujudkan Konsep Kawasan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (KPDPD) terpadu yang sesuai dengan tata ruang, dan keragaman potensi.
- b. Pembangunan kepariwisataan yang berdaya tarik.
- c. Pembangunan fasilitas umum dan kepariwisataan
- d. Pembangunan aksesibilitas atau transportasi menuju objek destinasi wisata.
- e. Konsep pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan desa wisata
- f. Peningkatan investasi di sektor pariwisata

9.1.4. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Kepariwisata

Kebijakan Pembangunan Pemasaran Kepariwisata

- a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial

- b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global
- c. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, Pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus pengembangan segmen MICE
- d. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata
- e. Pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing
- f. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata
- g. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan
- h. Pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan

9.1.5. Kebijakan Pembangunan Industri Kepariwisata

Kebijakan Pembangunan Industri Kepariwisata

- a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata
- b. Peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata
- c. Penguatan struktur usaha pariwisata
- d. Penguatan kemitraan usaha pariwisata.

9.1.6. Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

- a. Restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di tingkat Kabupaten

- b. Optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Kecamatan
- c. Optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di tingkat Kabupaten
- d. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat

9.2. Strategi Pembangunan Kepariwisataaan

9.2.1. Strategi Pembangunan Kepariwisataaan Berbasis Tata Ruang Dan Wilayah

Strategi Pembangunan Kepariwisataaan berbasis Tata Ruang dan Wilayah:

- a. Mensinergikan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo dengan Kawasan Pembangunan Kepariwisataaan agar memberikan peningkatan terhadap nilai tambah ekonomi daerah.
- b. Pemanfaatan potensi lingkungan dalam pembangunan kepariwisataaan.

9.2.2. Strategi Pembangunan Destinasi Kepariwisataaan

Strategi Pembangunan Destinasi Kepariwisataaan

- a. Mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata
- b. Memperkuat upaya pengelolaan daya tarik wisata dan lingkungan
- c. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah
- d. Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi

- e. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata; dan
- f. Revitalisasi struktur, elemen dan aktifitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan
- g. Mengembangkan sarana moda transportasi darat dan penyeberangan di sepanjang koridor pariwisata utama.
- h. Mengembangkan moda transportasi penghubung antara daya tarik wisata dan bandara
- i. Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan termasuk desa wisata
- j. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- k. Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata
- l. Mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal
- m. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat
- n. Meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata
- o. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan dalam negeri di sektor pariwisata
- p. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan
- q. Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata

9.2.3. Strategi Pembangunan Pemasaran Kepariwisata

Strategi Pembangunan Pemasaran Kepariwisata

- a. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan mancanegara
- b. Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab
- c. Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan
- d. Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki daerah
- e. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar
- f. Intensifikasi pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain
- g. Mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas
- h. Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk-produk wisata bagi wisatawan
- i. Memberikan intensif khusus wisata bagi wisatawan
- j. Mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus
- k. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu
- l. Meningkatkan publikasi promosi pariwisata
- m. Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen
- n. Meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata

- o. Mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik
- p. Mengembangkan E-Marketing
- q. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah
- r. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan
- s. Memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi

9.2.4. Strategi Pembangunan Industri Kepariwisata

Strategi Pengembangan Industri Kepariwisata

- a. Meningkatkan daya saing usaha pariwisata
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- c. Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata
- d. Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata
- e. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata
- f. Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata
- g. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai
- h. Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor

9.2.5. Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

- a. Reposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah

- b. Perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor
- c. Menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan strategis
- d. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata
- e. Memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat
- f. Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat

BAB 10

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA



Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan konsep penataan ruang yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Wajo. Ini mutlak harus dilakukan agar tidak terjadi benturan aspek tata ruang dan wilayah dalam pembangunan kepariwisataan. Sinkronisasi antar sektor menjadi penting karena dalam pembangunan kepariwisataan hampir semua aspek menjadi terintegrasi. Di sinilah konsep tata ruang dan wilayah menjadi dasar dalam rencana pembangunan kepariwisataan ke depan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan kepariwisataan berbasis penataan ruang adalah mengembangkan kepariwisataan Kabupaten Wajo dalam Struktur Tata Ruang Pariwisata Terpadu. Dimana ada tiga aspek yang perlu dilakukan yaitu:

- a. Menyusun rencana pembangunan struktur perwilayahan pembangunan pariwisata Kabupaten Wajo yang terpadu

sebagai kesatuan wilayah pembangunan yang saling melengkapi.

- b. Melakukan identifikasi serta menetapkan lokasi pusat-pusat pelayanan pada tingkat perwilayahan pariwisata yang terbentuk.
- c. Melakukan identifikasi serta menetapkan lokasi pembangunan fasilitas penunjang dan infrastruktur bagi kegiatan pariwisata di Kabupaten Wajo.

10.1. Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata

10.1.1. Rencana Pembangunan Kepariwisataan Berbasis Penataan Ruang dan Wilayah

Rencana struktur perwilayahan (tata ruang) bagi pembangunan pariwisata di Kabupaten Wajo digunakan kriteria yang mengacu pada konsep dan strategi umum pembangunan, ditambah dengan pertimbangan atas sejumlah kriteria yang mengacu pada konsep dan strategi umum pembangunan, ditambah dengan pertimbangan atas sejumlah kriteria yang berorientasi pada jenis dan karakter objek dan daya tarik wisata serta kondisi fisik geografis.

- a. Jenis dan karakter objek dan daya tarik wisata.
Kesamaan jenis dan karakter ODTW pada suatu lokasi sebaran akan efektif dan mengena dalam pembangunan dan pemasarannya apabila dirangkai dalam suatu jaringan keterkaitan membentuk area pembangunan pariwisata (kawasan wisata) dengan karakter spesifik.
- b. Kesamaan arah dan cara pencapaian/persiapan perjalanan.
Kesamaan arah dan cara pencapaian ke suatu lokasi sebaran beberapa ODTW, akan menguntungkan untuk dikembangkan

apabila dirangkai dalam satu keterkaitan membentuk suatu kawasan pembangunan.

- c. Kedekatan dari pusat-pusat pelayanan.

Kedekatan dari sarana-prasarana penunjang wisata merupakan sesuatu yang penting untuk diperhatikan dalam merangkai beberapa objek dan daya tarik wisata ke dalam suatu kesatuan pembangunan perwilayahan.

- d. Kedudukan sebaran objek dan daya tarik wisata secara geografis. Sebaran sejumlah ODTW pada suatu lokasi atau area tertentu yang secara fisik geografis baik secara topografi ataupun dengan pertimbangan kedekatan, yang nantinya akan berpengaruh pada waktu tempuh kunjungan wisata, akan sangat efektif dan menguntungkan pembangunan dan pemasarannya apabila dirangkai dalam suatu kawasan pembangunan.

Struktur perwilayahan pembangunan pariwisata Kabupaten Wajo berdasarkan hasil analisis dan konsep strategi yang akan diterapkan, maka rencana tata ruang pariwisata Kabupaten Wajo akan dibagi dalam 2 (dua) tingkat perwilayahan, yaitu:

- a. Kawasan Pembangunan Pariwisata (KPP)
- b. Wilayah Pembangunan Pariwisata (WPP)

Secara rinci kedua struktur perwilayahan pembangunan pariwisata Kabupaten Wajo dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten (KDPK)

Kawasan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (KPDPD), merupakan wilayah struktur pembangunan yang merangkum beberapa objek ataupun kawasan wisata dalam satu kesatuan pembangunan. Batasan dari KPDPD adalah suatu area yang didalamnya merupakan himpunan beberapa objek dan daya

tarik wisata, yang dirangkum atas dasar kesamaan arah dan cara pencapaian, efisiensi waktu pencapaian serta kedudukan ODTW yang secara geografis dapat dibentuk dalam satu keterkaitan (*linkage*).

KPDPD dibentuk dengan berdasarkan kriteria-kriteria pembentukan wilayah pariwisata di atas, terutama terkait dengan:

- 1) Pertimbangan kesamaan tipologi dari tinjauan jenis objek dan daya tarik wisata dominan yang ada di dalamnya.
- 2) Pertimbangan lokasi/sebaran secara geografis

b. Wilayah Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah (WPDPD)

WPDPD yaitu tingkat perwilayahan di atas KPDPD, yang merangkum beberapa KPDPD ke dalam satu kesatuan WPDPD. Pembentukan WPDPD, didasarkan atas kriteria-kriteria pembentukan wilayah pariwisata di atas, serta dikaitkan dengan:

- 1) Pertimbangan Konsep Struktur Tata Ruang pada Rencana Struktur Tata Ruang Kabupaten Wajo (dibagi dalam beberapa wilayah pembangunan dengan rencana yang secara potensi akan berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah/kawasan)
- 2) Pertimbangan kesamaan tipologi KPDPD dari tinjauan jenis objek dan daya tarik wisata dominan yang ada di dalamnya.

Batasan/delineasi dari struktur tata ruang wilayah pariwisata, baik pada tingkatan WPDPD maupun KPDPD, akan berpegang pada batas-batas formal yang sudah ada. Batas formal wilayah berupa batas administrasi wilayah baik berupa batasan dengan wilayah kota di sekitarnya, batas administrasi wilayah kecamatan ataupun batas administrasi wilayah kelurahan. Penggunaan batasan formal wilayah ini, dilakukan dengan

pertimbangan untuk kemudahan dalam koordinasi dan kelembagaan secara administratif.

Berdasarkan pada kriteria-kriteria di atas dan analisis yang telah dilakukan maka dalam pembangunan struktur perwilayahan pembangunan pariwisata Kabupaten Wajo dapat dikelompokkan 4 (empat) kawasan pembangunan pariwisata (KPDPD), yaitu:

- 1) KPDPD Wisata Danau Tempe
- 2) KPDPD Agro Wisata Sutera
- 3) KPDPD Wisata Budaya
- 4) KPDPD Wisata Alam

Rencana pembangunan struktur perwilayahan pariwisata Kabupaten Wajo dapat diuraikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 10.1
Rencana Perwilayahan Pariwisata Kabupaten Wajo

KPP	CAKUPAN WILAYAH	ODTW	PUSAT PELAYANAN	BASIS PEMBANGUNAN PRODUK
KPDPD-A (Wisata Danau Tempe)	<ul style="list-style-type: none"> o Kecamatan Tempe 	<ul style="list-style-type: none"> o Wisata Danau Tempe o Wisata Tampilan Sungai Walennae Paddupa o Festival Danau Tempe o Pusat Kuliner Paddupa o Konservasi Eceng Gondok o Pemukiman Terapung o Bendungan Bergerak 	Kecamatan Tempe	<ul style="list-style-type: none"> o Pembangunan ecotourism o Pembangunan sentral industri eceng gondok o Pembangunan pusat kuliner paddupa o Pembangunan pemukiman terapung
KPDPD-B (Agro Wisata Sutera)	<ul style="list-style-type: none"> o Kecamatan Sabbangparu o Kecamatan Tanasitolo o Kecamatan Tempe 	<ul style="list-style-type: none"> o Budi daya murbai dan ulat sutera o Pertenunan kain sutera o Sentra Industri kain sutera 	Pusat kota sengkang	<ul style="list-style-type: none"> o Pembagunan Sutera Agro Techno park o Pembagunan Sentra budi daya murbei dan ulat sutera o Pembangunan sentra industri tenun sutera o Carnaval sutera wajo o Symposium sutera nasional
KPDPD – C (Wisata Budaya dan religi)	<ul style="list-style-type: none"> o Kecamatan Tempe o Kecamatan Majauleng o Kecamatan Pammana o Kecamatan Maniangpajo 	<ul style="list-style-type: none"> o Perumahan Attakae o Situs Tosora o Situs Lagosi o Situs Pung Massora o Situs Istana Datunna Cina o Taman Makam Pahlawan o Saoraja Maniangpajo 	Kecamatan Tempe Kecamatan Majaulang Kecamatan Pammana Kecamatan Maniangpajo	<ul style="list-style-type: none"> o Pembangunan Kawasan Wisata Atakkae o Pembangunan Wisata Budaya, Sejarah, Rohani, dan Pendidikan
KPP	CAKUPAN	ODTW	PUSAT PELAYANAN	BASIS PEMBANGUNAN

WILAYAH		PRODUK	
KPDPD – D (Wisata Alam)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kecamatan Tempe ○ Kecamatan Keera ○ Kecamatan Maniangpajo ○ Kecamatan Pitumpanua 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Goa Nippon ○ Danau Bendungan Kalola ○ Kolam Renang Kalola ○ Air Terjun Awo ○ Pantai Lawara ○ Pantai Bangsala'e ○ Pantai Pasir Putih ○ Air Terjun Minangatellue ○ Air Terjun Keera 	<ul style="list-style-type: none"> Pusat Kota Sengkang Kecamatan Keera Kecamatan Maniangpajo Kecamatan Pitumpanua
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembangunan Wisata Sejarah Goa Nippon ○ Pembangunan Wisata Outbound ○ Pembangunan Pemandian ○ Pembangunan Kawasan Wisata Air Terjun ○ Pembangunan Camping Ground

10.1.2. Rencana Pembangunan Fasilitas Penunjang Wisata

Pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan wisata direncanakan akan pada lokasi-lokasi khusus yang strategis di masing-masing kawasan pembangunan pariwisata, dimana penempatan fasilitas penunjang kegiatan wisata harus memperhatikan karakter masing-masing objek wisata dan keinginan pasar sebagai subjek pariwisata.

Tabel 10.2
Rencana Pembangunan Fasilitas Penunjang Wisata untuk Skala DTW

Komponen Pembangunan	Jenis Fasilitas	Lokasi Pembangunan
Pembangunan Fasilitas Akomodasi	Hotel Resort	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan Wisata Atakkae ○ Kawasan Wisata Alam Kalola ○ Perumahan Terapung Danau Tempe
	Camping Ground	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan Wisata Atakkae ○ Kawasan Wisata Alam Kalola
	Hotel Kota	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang
Pembangunan Fasilitas Rumah Makan	Rumah Makan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang
	Rumah Makan Indonesia/local	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang ○ Kawasan Wisata Alam Kalola ○ Kawasan Wisata Atakkae ○ Pantai Lawara ○ Kawasan Wisata Tosora
	Kios Makanan Khas Wajo	<ul style="list-style-type: none"> ○ Perumahan Terapung Danau Tempe ○ Pusat Kota Sengkang ○ Kawasan Wisata Sutera-Agro Techno Park ○ Pusat Kuliner Paddupa ○ Kampung Kontainer Stadion A. Ninnong

Komponen Pembangunan	Jenis Fasilitas	Lokasi Pembangunan
Pembangunan Fasilitas Informasi Wisata	Tourist Information Centre (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang
	Papan Informasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ○ Semua KPP ○ Pusat Kota Sengkang ○ Kantor TIC
Pembangunan Fasilitas Telekomunikasi	Jaringan Seluler	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang ○ Kawasan Wisata Atakkae ○ Kawasan Wisata Alam Kalola ○ Kawasan Wisata Sutera – Agro Techno Park ○ Kawasan Wisata Danau Tempe
Pembangunan Fasilitas Penjualan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Art - Shop 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang
Cinderamata	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kios cinderamata 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan wisata atakkae ○ Kawasan Wisata Kalola ○ Kawasan Wisata Sutera – Agro Techno Park ○ Kawasan Wisata Danau Tempe
Pembangunan Fasilitas Jasa Pengatur Perjalanan Wisata	Biro Perjalanan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pusat Kota Sengkang ○ Kantor TIC
Pembangunan Petunjuk Penandaan	Main Gate	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masing-masing OW
	Petunjuk Arah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kawasan Wisata Danau Tempe ○ Kawasan Wisata Tepian Sungai Walenna Paddupa ○ Kawasan Wisata Atakkae ○ Kawasan Wisata Sutera Agro ○ Kawasan Wisata Alam Kalola ○ Goa Nippon ○ Kawasan Wisata Air Terjun Keera ○ Kawasan Wisata Air

Komponen Pembangunan	Jenis Fasilitas	Lokasi Pembangunan
		<ul style="list-style-type: none"> ○ Terjun Minangatellue ○ Kawasan Wisata Air Terjun Awo ○ Situs Tosora ○ Situs Lagosi ○ Situs Pung Massora ○ Situs Istana Dantuna Cina

10.2. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata

10.2.1. Rencana Pengembangan dan Kawasan Strategi Destinasi Kepariwisataaan

Pengembangan destinasi pariwisata sangat penting untuk dilakukan dalam rangka pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo. Dalam mengembangkan Destinasi Pariwisata, perlu diarahkan untuk menggali potensi wisata yang ada di daerah, berbasis kepada konsep wisata lingkungan (ecotourism) yang memperhatikan tatanan lingkungan, memperkuat akar budaya daerah dan menciptakan daya saing dalam pembangunan daerah. Ada empat aspek yang menjadi perhatian khusus:

- a. Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan melalui pengembangan destinasi.
- b. Mewujudkan konsep destinasi kepariwisataan berwawasan lingkungan.
- c. Menjaga tatanan budaya masyarakat dalam pembangunan destinasi kepariwisataan.
- d. Peningkatan daya saing kepariwisataan Kabupaten Wajo melalui pengembangan destinasi.

Program pengembangan destinasi pariwisata pada tahun 2013-2025, diimplementasikan melalui 6 kegiatan pokok, yaitu: (1) peningkatan perencanaan destinasi dan investasi pariwisata;

(2) pengembangan daya tarik wisata (3) pengembangan industri pariwisata; (4) pemberdayaan masyarakat di destinasi wisata; (5) pengembangan wisata minat khusus, konvensi, insentif dan event; dan (6) dukungan manajemen dan tugas teknis pengembangan destinasi pariwisata lainnya.

Tujuan pelaksanaan program pengembangan Destinasi Pariwisata adalah:

a. Peningkatan devisa dan pengeluaran wisatawan

Penerimaan devisa dihitung melalui jumlah total pengeluaran wisatawan mancanegara sebelum berwisata (*pre-trip expenditure*), selama berwisata (*trip expenditure*), dan sesudah berwisata (*post-trip expenditure*). Pengeluaran *pre-trip* dan *post-trip* meliputi hotel dan akomodasi, restoran dan sejenis, angkutan domestik, BPW dan pramuwisata, serta produk nonmakanan. Sedangkan *trip-expenditure* meliputi pengeluaran *pre-trip* dan *post-trip*, ditambah pengeluaran yang dilakukan selama berwisata di Kabupaten Wajo, seperti jasa seni/budaya, cinderamata, kesehatan dan kecantikan, serta produk lainnya.

Nilai total penerimaan dari pengeluaran wisatawan nusantara, yaitu penerimaan daerah yang diperoleh dari total pengeluaran wisatawan Kabupaten Wajo yang berwisata di wilayah Kabupaten Wajo. Jenis-jenis pengeluaran wisatawan nusantara antara lain : akomodasi, restoran dan sejenisnya, angkutan domestik, BPW dan pramuwisata, produk nonmakanan, jasa seni/budaya, cinderamata, kesehatan dan kecantikan, serta produk tani.

Jumlah pengeluaran per wisatawan mancanegara/kunjungan, yaitu rata-rata pengeluaran setiap wisatawan mancanegara per satu kunjungan ke Kabupaten Wajo.

Pengembangan destinasi pariwisata diarahkan untuk mendorong terciptanya produk dan jasa yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang menyejahterakan masyarakat setempat dan mampu menarik wisatawan yang berkualitas (*magnitude of tourism*). Hal ini ditandai dengan tingkat jumlah pengeluaran per wisatawan (*tourist expenditure*) yang semakin besar sehingga dapat memberikan efek berganda (*multiplier effect*) pada sektor pariwisata. Dengan indikator ini, pengembangan destinasi dapat dilakukan secara berkelanjutan karena membidik wisatawan yang berpengeluaran tinggi (*high spending tourist*) sehingga tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) destinasi pariwisata tersebut.

Jumlah pengeluaran per wisatawan nusantara/kunjungan, yaitu rata-rata pengeluaran setiap wisatawan nusantara pada setiap perjalanan wisata di daerah Kabupaten Wajo. Destinasi pariwisata tidak hanya diharapkan untuk mampu menarik wisatawan mancanegara yang berkualitas, namun juga wisatawan nusantara yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan peningkatan rata-rata pengeluaran setiap wisatawan nusantara (per orang) per kunjungan ke daerah Kabupaten Wajo. Semenjak tahun 2011, terjadi peningkatan rata-rata pendapatan yang berpengaruh terhadap ketahanan daya beli masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pada kelas ekonomi menengah. Oleh karena itu, sektor Kabupaten Wajo yang berkualitas (berdaya beli tinggi) untuk melakukan wisata di dalam negeri dan membeli produk pariwisata lokal.

b. Peningkatan investasi di sektor pariwisata

Kunjungan investasi sektor pariwisata terhadap total investasi daerah, yaitu persentase nilai di sektor pariwisata

terhadap total nilai investasi daerah. Investasi oleh pemerintah dialokasikan untuk barang modal pada perwilayahan pembangunan kepariwisataan. Barang modal tersebut meliputi: (1) Aksesibilitas pariwisata, misalnya : alat angkutan dan infrastruktur (jalan, jembatan, dan pelabuhan); (2) fasilitas umum, misalnya fasilitas keamanan dan fasilitas kesehatan; (3) fasilitas pariwisata, misalnya bangunan olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya dan bangunan bukan tempat tinggal. Sedangkan investasi oleh swasta biasanya dialokasikan untuk barang modal : bangunan hotel dan akomodasi, restoran, serta bangunan lainnya. Semakin tinggi persentase investasi pariwisata terhadap investasi daerah menunjukkan daya tarik industri pariwisata dan iklim usaha yang semakin baik.

Jumlah fasilitasi perancangan destinasi untuk investasi pariwisata, dihitung melalui unit lokasi yang difasilitasi untuk dikembangkan sehingga menjadi destinasi pariwisata yang menarik minat investor. Fasilitasi perancangan destinasi meliputi proses menyiapkan pola dan desain, penerapan desain pada lokasi destinasi, dan proses evaluasi implementasi dari perancangan destinasi tersebut. Modal perancangan destinasi tersebut diharapkan dapat mendorong minat investasi dari pemerintah maupun sektor swasta melalui pengembangan industri- industri di sekitar destinasi tersebut;

Rasio jumlah kamar hotel per 100 penduduk, Mencerminkan destinasi ketersediaan kamar hotel di Kabupaten Wajo. Data densitas kamar hotel tersebut dicatat oleh UNWTO yang kemudian diolah sebagai salah satu subpilar TPCI. Semakin

tinggi nilai rasio, semakin baik pula kondisi infrastruktur pariwisata.

- c. Peningkatan kontribusi kepariwisataan terhadap kualitas dan kuantitas tenaga kerja daerah

Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung dan ikutan sektor pariwisata, yaitu total tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor perekonomian akibat adanya aktivitas pariwisata, baik langsung, tidak langsung, maupun ikutan. Sektor pariwisata memberi dampak yang cukup tinggi dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Penciptaan lapangan pekerjaan sudah dimulai sejak wisatawan akan berangkat (tenaga kerja jasa perjalanan wisata), tiba di bandara (*porter*, tenaga kerja pengangkutan), dan ketika melakukan aktivitas perjalanan wisata (pemandu wisata dan penginapan);

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja daerah, yaitu persentase partisipasi jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor-sektor terkait pariwisata, dibanding tenaga kerja daerah. Semakin tinggi kontribusi pariwisata dalam menyerap tenaga kerja, maka semakin besar peran pariwisata dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan daerah;

Produktivitas tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata, yaitu besaran realisasi nominal PDRB sektor pariwisata dibagi jumlah tenaga kerja sektor pariwisata per tahun. Indikator ini menunjukkan peran setiap pekerja di sektor terkait pariwisata dalam membentuk tingkat upah, baik langsung, tidak langsung, maupun ikutan. Indikator ini juga merupakan cerminan tingkat kesejahteraan pekerja di sektor-sektor terkait pariwisata.

d. Peningkatan citra kepariwisataan

Meningkatnya keragaman destinasi pariwisata. Jumlah lokasi daya tarik wisata di DPD yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata, diukur dari banyaknya lokasi Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) yang dikembangkan dari daya tarik wisata di dalamnya. Dari 16 Destinasi Pariwisata Daerah, sebanyak 3 lokasi daya tarik wisata akan dikembangkan secara bertahap sampai dengan tahun 2014 melalui pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan buatan, serta produk wisata minat khusus dalam rangka menarik kedatangan wisatawan ke Kabupaten Wajo. Pengembangan daya tarik wisata meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, untuk menciptakan nilai tambah sehingga suatu destinasi memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan; jumlah desa yang difasilitasi untuk dikembangkan sebagai desa wisata, menunjukkan upaya pengembangan desa-desa yang memiliki potensi dan sumber daya wisata dengan penerapan prinsip *community based tourism*. Pengembangan desa wisata mendorong tingkat partisipasi masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun pelaku utama pariwisata di destinasi wisata. Hal ini memungkinkan pengembangan desa wisata dapat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pembangunan pariwisata (*pro poor tourism*).

Jumlah pola perjalanan yang dikembangkan, indikator ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas destinasi pariwisata, sehingga terjadi peningkatan lama tinggal, dan

pengeluaran wisatawan. Pola perjalanan pariwisata adalah struktur, kerangka dan alur pergerakan perjalanan wisata dari satu titik destinasi ke titik destinasi lainnya yang saling terkait dan berisi informasi tentang fasilitas, aktivitas dan pelayanan. Peningkatan jumlah pola perjalanan memberikan lebih banyak pilihan perjalanan wisata bagi industri maupun wisatawan individu untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam melakukan perjalanan wisata;

Meningkatnya keragaman produk wisata minat khusus dan zona kreatif di Kabupaten Wajo. Jumlah produk wisata minat khusus yang dikembangkan, yaitu jumlah pengembangan wisata minat khusus yang bertujuan untuk menambah variasi aktivitas perjalanan wisata yang sesuai dengan preferensi dan tren wisatawan. Produk wisata minat khusus mencakup inovasi jenis wisata tertentu (tematik) sehingga wisatawan tersebut membutuhkan keahlian dan dapat memberikan pengalaman serta pembelajaran di bidang: budaya dan sejarah, olahraga dan rekreasi, kuliner, dan ekowisata.

Jumlah aktivasi zona kreatif sebagai destinasi pariwisata, yaitu jumlah daerah yang diaktivasi menjadi zona kreatif. Zona kreatif di destinasi pariwisata diciptakan untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat untuk mengekspresikan kemampuan berdasarkan ide kreatif berbasis kearifan lokal, sehingga mampu memperkaya pengalaman berwisata, menghasilkan karya-karya kreatif, dan dapat memberikan nilai tambah pada masyarakat sekitar.

- e. Peningkatan diversifikasi destinasi pariwisata
- f. Penguatan dan peningkatan kualitas SDM

10.2.2. Rencana Pengembangan dan Kawasan Strategi Pemasaran Kepariwisata

Peranan pemasaran sangat penting dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata. Tanpa adanya pemasaran maka tidak akan ada arti dari potensi pariwisata yang ada. Pemasaran pariwisata berfungsi untuk mengenalkan masyarakat akan daya tarik pariwisata yang ada. Untuk itu diperlukan strategi pemasaran kepariwisataan yang baik untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo. Dalam menyusun strategi dan rencana pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Wajo dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Segmen pasar wisatawan nusantara (wisnus) diarahkan pada Wisnus lokal sebagai segmen pasar aktual, dan segmen pasar wisnus dari luar wilayah Kabupaten Wajo dan Sulawesi Selatan sebagai segmen pasar potensial.
- b. Segmen pasar wisatawan mancanegara difokuskan pada pasar Eropa, dengan segmen pasar potensial untuk dikembangkan adalah pasar Asia.
- c. Target pasar wisatawan nusantara diarahkan pada segmen dari kelompok ekonomi menengah yang melakukan kegiatan wisata dalam kelompok (keluarga). Target pasar wisatawan mancanegara diarahkan pada segmen wisatawan mancanegara yang memiliki ketertarikan dan keterkaitan historis atau psikologis dengan objek-objek peninggalan budaya dan sejarah serta wisata alam dan ilmu pengetahuan yang ada di Kabupaten Wajo.
- d. *Positioning* untuk pasar wisatawan nusantara dikembangkan dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan, yaitu mengarah pada tema “berwisata bersama keluarga”.

Sementara *positioning* untuk pasar wisatawan mancanegara diarahkan pada tema “wisata ecotourism, petualangan, sejarah dan budaya”.

- e. Pengembangan pemasaran dilakukan melalui penciptaan pembauran pemasaran (marketing mix) yang dikembangkan secara terpisah untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebagai berikut:

Tabel 10.3
Matriks Strategi Pengembangan Pembauran Pemasaran

Komponen Bauran Pemasaran	Segmen Wisnus	Segmen Wisman
Produk	Produk-produk berbasis aktivitas dan bersifat rekreatif (wisata budaya, wisata religi, wisata sejarah, agrowisata, wisata alam dan ecotourism)	Produk-produk berbasis petualangan (wisata alam), budaya dan sejarah serta wisata belanja (sentra kerajinan), ecotourism (kawasan wisata Danau Tempe)
Harga	Penetapan harga jual produk untuk golongan ekonomi kelas menengah	Penetapan harga dengan mempertimbangkan aspek- aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Nilai tambah (value added) • Total harga jual paket • Subsidi untuk konservasi (lingkungan alam dan Budaya)
Jaringan promosi/distribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata pada lokasi strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisnus • Pengembangan Sistem Informasi Wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan promosi pada daerah (kota) yang menjadi pintu masuk atau <i>Base camp</i> Wisman • Pengembangan Sistem Informasi Wisata
Promosi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan alat promosi Cetakan (brosur leaflet Objek Wisata, Peta Wisata, Buku Saku Objek Wisata) • Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk alat promosi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan alat Promosi cetakan (brosur, Leaflet Objek Wisata, Peta Wisata, Buku Saku Objek Wisata) dalam 2 bahasa (Indonesia dan Inggris)

Strategi dan rencana pengembangan pasar dan pemasaran pariwisata Kabupaten Wajo dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10.4
Matriks Strategi dan Rencana Pengembangan Pemasaran

Kondisi Aktual	Kondisi yang ingin Dicapai	Strategi pengembangan	Rencana Pengembangan
Pembangunan citra pariwisata Kabupaten Wajo	Menciptakan citra pembangunan Pariwisata Kabupaten Wajo agar berbeda dengan daerah yang lainnya	Menciptakan <i>brand image</i> pariwisata di Kabupaten Wajo adalah pariwisata yang berkelanjutan, dengan ciri khas wisata ekologi, budaya dan alam yang mampu bersaing secara Internasional	Pengembangan citra pariwisata Kabupaten Wajo disebarluaskan melalui berbagai alat/ media promosi yang didasari oleh potensi atraksi wisata yang ditawarkan
Eksplorasi dan eksploitasi pasar potensial	Meluasnya pasar wisata Kabupaten Wajo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendorong peningkatan kunjungan Wisatawan melalui promosi yang progresif dan penyampaian informasi yang aktif tentang keunikan pariwisata Wajo ▪ Perlibatan biro perjalanan wisata, pengelola hotel, rumah makan dan restoran untuk menyediakan ruang atau <i>banner display</i> untuk promosi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membentuk aliansi kerjasama sinergis, dalam menyusun pemasaran bersama produk-produk wisata di Kabupaten Wajo dengan kota atau ODTW di luar Kabupaten Wajo dalam lingkup Sulawesi Selatan dan Nasional
Pasar Wisnus didominasi wisnus lokal dari kelompok ekonomi menengah	Peningkatan pergerakan wisnus lokal dan kunjungan wisnus dari provinsi lain.	Pengembangan <i>positioning</i> dengan melihat pada karakter produk dan profil wisatawan, yaitu mengarah pada tema “berwisata bersama keluarga.”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penciptaan produk- produk baru bernuansa rekreatif dan wisata keluarga yang berbasis pada jenis wisata alam (tirta) dan budaya ▪ Penciptaan slogan/ <i>branding</i> untuk pariwisata Kabupaten Wajo

Kondisi Aktual	Kondisi yang ingin Dicapai	Strategi pengembangan	Rencana Pengembangan
Pasar Wisman	Peningkatan positif dari tahun ke tahun atas segmen pasar actual (Eropa) serta perluasan pasar-pasar potensial (Asia)	Pengembangan positioning yang diarahkan pada tema “wisata petualangan, ecotourism, sejarah dan budaya”	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengemasan objek-objek eksisting ke dalam paket-paket bertema nostalgia/romantisme masa lalu ▪ Diversifikasi produk bertema air dan petualangan
Alat promosi berupa leaflet/ brosur dan peta wisata	Tersedianya berbagai informasi dalam berbagai format alat promosi (cetakan, CD interaktif, video) serta informasi digital melalui media internet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan alat promosi cetakan (Brosur Leaflet Obyek Wisata) ▪ Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi untuk alat promosi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reformasi format dan materi alat-alat promosi pariwisata, yang difokuskan pada penguatan positioning serta kebutuhan informasi wisatawan ▪ Reformulasi promosi kepariwisataan Kabupaten Wajo melalui media internet
Distribusi promosi / jaringan promosi	Tersampainya informasi mengenai produk Kepariwisata Kabupaten Wajo (objek, akomodasi, paket wisata, dsb) aksesibilitas dan fasilitas pendukungnya pada target pasar yang tepat (baik untuk Wisnus dan wisman)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan pusat informasi pariwisata pada lokasi strategis yang mudah dijangkau dan berada pada rangkaian jalur pergerakan wisnus ▪ Perluasan jaringan promosi pada daerah (kota) yang menjadi pintu masuk atau <i>base camp</i> wisman. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerjasama promosi dan pemaketan dengan daerah tujuan wisata di sekitarnya ▪ Pengembangan sistem informasi wisata bersama lintas kabupaten sebagai tempat <i>entry point</i> wisman

10.2.3. Rencana Pengembangan dan Kawasan Strategi Industri Kepariwisata

Dalam konsep ekonomi, industri merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan produk/jasa yang memiliki nilai tambah ekonomi. Bila dihubungkan dengan kepariwisataan maka industri kepariwisataan adalah bagaimana menciptakan produk yang memiliki nilai tambah ekonomi. Dalam kerangka kepariwisataan ada empat pilar yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Penguatan struktur industri pariwisata

Struktur industri merupakan hierarki dari mata rantai industri. Hierarki ini harus dibentuk berdasarkan konsep nilai tambah terhadap industri. Dalam struktur industri pariwisata, hierarki harus disusun sesuai dengan potensi yang ada dari kepariwisataan yang ada di Kabupaten Wajo.

Untuk memberikan penguatan terhadap struktur industri pariwisata maka diperlukan tiga hal pendukung utama yaitu:

- 1) Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- 2) Menguatkan fungsi, hierarki dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- 3) Menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

b. Peningkatan daya saing produk pariwisata

Menciptakan daya saing produk dalam konsep industri merupakan sebuah strategi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kualitas produk akan mendorong terjadinya peningkatan karena setiap individu akan mencari produk yang berkualitas. Untuk itu perlu upaya dalam pembangunan pariwisata daerah untuk menciptakan daya saing terhadap produk pariwisata.

Ada tiga pilar utama untuk menciptakan daya saing produk pariwisata untuk Kabupaten Wajo dalam menyusun Rencana Pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu:

- 1) Daya saing terhadap daya tarik wisata. Untuk menciptakan daya saing terhadap daya tarik wisata perlu memperhatikan pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik pariwisata.
- 2) Daya saing fasilitas Pariwisata. Menciptakan daya saing fasilitas Pariwisata harus memperhatikan pengembangan terhadap kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar nasional, mengangkat keunikan lokal dan berwawasan lingkungan.
- 3) Daya saing aksesibilitas pariwisata. Aksesibilitas memiliki fungsi utama dalam menyokong pembangunan kepariwisataan. Diperlukan pengembangan terhadap kapasitas dan kualitas layanan transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke destinasi pariwisata.

c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata

Kemitraan Usaha Pariwisata memiliki tujuan untuk sinkronisasi dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Kemitraan usaha ini perlu agar setiap pelaku usaha pariwisata dapat berkontribusi besar dalam upaya pembangunan kepariwisataan.

Ada tiga Skema dalam pengembangan kemitraan usaha pariwisata yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo:

- 1) Memperkuat kerja sama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

- 2) Menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
 - 3) Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- d. Penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata
- Tujuan dari menciptakan kredibilitas bisnis adalah agar dalam pengelolaan industri pariwisata perlu diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha kepariwisataan yang kredibel dan berkualitas.
- Ada tiga aspek penciptaan kredibilitas bisnis yang perlu dikembangkan dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Wajo yaitu:
- 1) Menerapkan standarisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dan nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
 - 2) Menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik.
 - 3) Mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- e. Pengembangan industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan
- Konsep industri berwawasan lingkungan saat ini mendapatkan tempat utama terutama bagi industri berbasis Pariwisata. Konsep ecotourism menjadi daya saing dalam pembangunan kepariwisataan. Secara global, dunia internasional sangat memberikan respon positif terhadap pengembangan industri pariwisata yang berwawasan

lingkungan. Bagi industri pariwisata di Kabupaten Wajo diperlukan bentuk pembangunan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pembangunan ekonomi hijau.

Untuk mendorong pembangunan industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan maka ada pilar khusus yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo yaitu:

- 1) Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata.
- 2) Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

10.2.4. Rencana Pengembangan dan Kawasan Strategi Kelembagaan Kepariwisata

Sebuah kelembagaan yang jelas merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan dalam sebuah objek wisata. Sehingga dapat berpengaruh terhadap perkembangan ODTW. Kelembagaan juga memerlukan sebuah koordinasi dari setiap tupoksinya sendiri-sendiri. Karena koordinasi merupakan hal penting yang perlu dilakukan di dalam konteks kerja sama pembangunan yang melibatkan banyak pelaku, baik dalam konteks dinas/lembaga/kantor Pemerintah Kabupaten Wajo maupun yang melibatkan sektor swasta/investor dan masyarakat.

Diperlukan arahan-arahan untuk mengupayakan agar fungsi dari sebuah sistem kelembagaan tersebut jelas dan dapat dilakukan seoptimal mungkin. Arahan-arahan tersebut adalah:

- a. Adanya sebuah sistem yang jelas dalam sebuah kelembagaan dengan adanya kepala dan staf-stafnya;

- b. Terdapatnya struktur organisasi kelembagaan yang jelas dengan mempunyai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) yang jelas dan harus dipertanggungjawabkan.
- c. Menyelenggarakan proses rapat koordinasi pembangunan yang menekankan pada pola penganggaran yang efisien, koordinatif, adanya prioritas yang jelas.
- d. Adanya sebuah kerjasama integral antara PEMDA dengan pihak swasta, sehingga dapat terjadi sebuah koordinasi yang baik yang berpengaruh terhadap perkembangan sektor wisata itu sendiri.

Informasi dalam sebuah objek wisata perlu dilakukan, dengan adanya informasi yang jelas dapat memberikan pemahaman tentang objek wisata yang ditawarkan, sehingga pengunjung pun merasa jelas dan dapat menikmati wisata tersebut.

Informasi tidak hanya cukup dengan adanya sebuah papan informasi yang menjelaskan tentang objek wisata tersebut/prolog. Agar lebih komunikatif dengan seorang pengunjung, maka kelembagaan yang ada di objek wisata tersebut harus mempunyai seorang pemandu wisata yang memahami betul tentang objek wisata yang ditawarkan, tidak hanya itu seorang pemandu wisata harus bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, sehingga dapat mempermudah komunikasi apabila sedang berhadapan dengan wisatawan mancanegara.

Diperlukan arahan-arahan untuk memperjelas upaya-upaya peningkatan peran sektor kelembagaan dalam panduan terhadap pengunjung yang membutuhkan pemandu wisata yang jelas arahan tersebut adalah:

- a. Memberikan pelatihan khusus kepada para pemandu wisata yang berupa pelatihan cara komunikasi yang baik, mempelajari beberapa bahasa yang diperlukan.

- b. Mendorong kelompok masyarakat lokal agar diikut sertakan dalam kegiatan pemandu wisata, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terdapat diwilayah tersebut.
- c. Membuat sebuah rute perjalanan yang dibuat oleh kelembagaan objek wisata yang bersangkutan, sehingga dapat mempermudah pemandu dalam menyampaikan penjelasan kepada para pengunjung dan dalam berjalan secara sistematis atau beraturan.
- d. Adanya kualitas SDM yang cukup sehingga dapat menjalankan TUPOKSI (Tugas, Pokok dan Fungsi) dengan baik dan peran lembaga dapat berjalan optimal khususnya dibidang pariwisata.
- e. Adanya peran *Tourism Information Centre* (TIC) memudahkan pengunjung dalam menikmati objek wisata yang bersangkutan.
- f. Membentuk Dewan Kepariwisata Daerah (DKD) Kabupaten Wajo.

Tabel 10.5
Strategi dan Rencana Pengembangan Kelembagaan

STRATEGI	RENCANA
Perlu dilakukan suatu sistem kelembagaan yang jelas dan akan berpengaruh terhadap perkembangan objek wisata itu sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> o Membuat suatu sistem kelembagaan disetiap objek wisata yang sekiranya mempunyai potensi untuk dikembangkan. o Mengembangkan sumber daya manusia/adanya sebuah pelatihan khusus yang bertujuan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dalam memimpin sebuah kelembagaan sehingga dapat berpengaruh terhadap suatu sistem/mekanisme yang akan diterapkan dalam lingkup internal tersebut/kelembagaan objek wisata. o Mempunyai seorang manajer/pemimpin kelembagaan yang kompeten dapat berpengaruh terhadap sistem mekanisme yang akan diterapkan didalamnya. o Mengembangkan mekanisme koordinasi yang efektif antar dinas/lembaga/pemerintah secara vertikal (Pemerintah Kabupaten-Provinsi-Pusat), maupun horizontal (antar dinas pemerintah yang ada di Kabupaten Wajo)

STRATEGI	RENCANA
Kemampuan setiap objek dalam memberikan informasi yang jelas dapat dilakukan dengan adanya pemandu wisata didalamnya.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengembangkan SDM yang akan dijadikan pemandu disetiap objek wisata dengan membuat pelatihan khusus bagi SDM tersebut. Baik itu pelatihan mempelajari beberapa bahasa asing, pemahaman tentang objek wisata yang bersangkutan, cara berkomunikasi yang baik dan sopan, dll ○ Mengembangkan SDM dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pelaksanaan pelatihan
Adanya Dewan Kepariwisata Daerah (DKD) Kabupaten Wajo.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Membuat kelembagaan disetiap pos-pos wisata sehingga pengunjung dapat melakukan kegiatan dengan mudah dan akan mendapatkan informasi yang akan diberikan disetiap pos-pos ○ Menciptakan tatanan organisasi kepariwisataan yang terintegrasi. ○ Melakukan promosi dan pemasaran kepariwisataan ○ Mengkoordinasikan potensi pariwisata kepada para investor. ○ Mendesain event-event wisata bertaraf domestik, nasional dan internasional. ○ Mengembangkan infrastruktur yang ada di setiap kawasan wisata.

BAB 11

PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN



- A. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Berbasis Tata Ruang Dan Wilayah
 - 1. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kepariwisata berbasis Tata Ruang dan Wilayah
 - a. Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah
 - b. Konservasi Objek Destinasi Wisata Danau Tempe
 - c. Penataan Ruang Dan Wilayah Objek Destinasi Wisata melalui pembangunan fasilitas umum dan kepariwisataan

- B. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Destinasi Kepariwisata
 - 1. Program Pembangunan KPDPD – A (Objek Destinasi Wisata Danau Tempe)

- a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) Danau Tempe
 - b. Pembangunan kawasan konservasi eceng gondok (Eceng Gondok Conservation Research Center)
 - c. Revitalisasi pemukiman terapung dan pembangunan penginapan
 - d. Pembangunan dermaga dan peningkatan kapasitas transportasi air untuk wisatawan
 - e. Pembangunan sentra industri kerajinan eceng gondok
 - f. Peningkatan kapasitas program wisata Festival Danau Tempe
 - g. Pembangunan pusat kuliner Padduppa
 - h. Pembangunan fasilitas umum dan kepariwisataan
 - i. Pengembangan kawasan tiga pulau danau tempe
 - j. Pembangunan kawasan RTH Callaccu
 - k. Pembangunan kawasan wisata sungai cendranae
2. Program Pembangunan fasilitas KPDPD – B (Agro Wisata Sutera)
 - a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) Agro Wisata Sutera
 - b. Pembangunan Sutera Agro Techno Park
 - c. International Sutera Carnaval – Sengkang
 - d. Pembangunan fasilitas umum dan kepariwisataan
3. Program pembangunan KPDPD – C (Wisata Budaya)
 - a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) Perumahan Adat Atakkae
 - b. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) Situs Budaya Kabupaten Wajo

- c. Pembangunan kawasan wisata budaya dan outbound Atakkae
 - d. Pembangunan kawasan wisata Situs Tosora
 - e. Pembangunan kawasan wisata Situs Lagosi
 - f. Pembangunan kawasan wisata Situs Pung Massora
 - g. Pembangunan kawasan wisata Situs Istana Datunna Cina
 - h. Pembangunan kawasan wisata Taman Makam Pahlawan
 - i. Pembangunan kawasan wisata Saoraja Maniangpajo
 - j. Pembangunan fasilitas umum dan kepariwisataan
4. Program Pembangunan KPDPD – D (Wisata Alam)
- a. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek (RIPOW) Kawasan Wisata Alam Kalola
 - b. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata (RIPOW) Air Terjun Awo
 - c. Pembangunan kawasan wisata Alam Kalola
 - d. Pembangunan kawasan Wisata Air Terjun Awo
 - e. Pembangunan kawasan Pantai Lawara
 - f. Pembangunan kawasan wisata Pantai Bangsala'e
 - g. Pembangunan kawasan wisata Air Terjun Minangatellue
 - h. Pembangunan kawasan wisata Air Terjun Keera
 - i. Pembangunan fasilitas umum dan kepariwisataan
5. Program Pembangunan Bersifat Umum
- a. Pembangunan infrastruktur transportasi dan jalan yang menghubungkan antar destinasi pariwisata
 - b. Penyusunan peraturan daerah mengenal investasi di sektor kepariwistaan

C. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Pemasaran Kepariwisataaan

1. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Pemasaran Kepariwisataaan

- a. Pembuatan website kepariwisataan Kabupaten Wajo
- b. Pengembangan *E_Wajo Tourism Marketing*
- c. Pembuatan iklan/film pendek mengenai potensi kepariwisataan Kabupaten Wajo
- d. Pembuatan leaflet, brosur dan media promosi cetak untuk mempromosikan destinasi wisata
- e. Ikut serta dalam event-event kepariwisataan
- f. Memperkuat system pemasaran produk-produk kreatif yang diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Wajo

D. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Industri Kepariwisataaan

1. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Industri Kepariwisataaan

- a. Kajian Pengembangan Industri kreatif di Kabupaten wajo
- b. Pengembangan industri sutera
- c. Pengembangan produk-produk kreatif berbasis kepariwisataan
- d. Workshop pengembangan industri kreatif berbasis UMKM
- e. Pembangunan sentra industri kerajinan eceng gondok
- f. Pengembangan industri kuliner sebagai pendukung destinasi pariwisata

- E. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
1. Program dan Indikasi Kegiatan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata
 - a. Pembentukan Dewan Kepariwisata Daerah (DKD) Kabupaten Wajo
 - b. Pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan di Kabupaten Wajo